Pelopor Pilihan17

Dibuat oleh
Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas

National Benchmark Survey

Memahami kesadaran dan persepsi orang muda Indonesia mengenai isu lingkungan, hak asasi manusia, gender, dan korupsi

REPORT
DIRILIS – 21 Agustus 2025

Kawula17 © 2025 by PP17 Maria Angelica Christy Aka, Muhammad Hendra Mulyana, Kaori Anindwipa, Ghevin Agung Nugraha, Dian Irawati, and Juris Bramantyo is licensed under CC BY 4.0

01 Pengantar

07 Ringkasan Temuan

11 Tingkat Aktivisme

18 Spektrum Politik

28 Topik Penting bagi Orang Muda

34 Isu Korupsi

40 Isu Hak Asasi Manusia

47 Isu Gender

55 Isu Lingkungan

60 Isu Pendidikan

63 Isu Ekonomi

64 Penilaian Peran Pemerintah

68 Aspirasi Keterlibatan Orang Muda

72 Metodologi

Pengantar (1)

Laporan National Benchmark Survey (NBS) dari Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas ini dipersembahkan untuk 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan baru yang telah 9 bulan berjalan, dan menjadi refleksi atas semester pertama tahun 2025.

Rangkaian temuan NBS Semester I 2025 menunjukkan bahwa, meski terdapat kemajuan di berbagai bidang, Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk sepenuhnya mewujudkan cita-cita kemerdekaan: menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bebas dari ketidaksetaraan.

Tantangan ini menjadi pekerjaan bersama, termasuk bagi orang muda, yang memiliki peran strategis untuk mendorong perubahan melalui perspektif kritis dan partisipasi aktif. Laporan NBS memotret kesadaran, persepsi, dan sikap orang muda Indonesia terhadap isu lingkungan, gender, hak asasi manusia, dan korupsi, sekaligus memberikan landasan data yang kuat bagi upaya perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi mereka. Oleh karena itu, laporan ini dimaksudkan sebagai cermin objektif terhadap pandangan dan persepsi publik, terutama orang muda, pada periode transisi yang krusial ini.

Semester pertama tahun 2025 telah berlalu dengan berbagai dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mewarnai Indonesia. Selama periode tersebut, sejumlah isu krusial menuntut perhatian lebih, terutama berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Proses legislasi yang tertutup, pembubaran aksi dan demonstrasi secara represif, serta intimidasi terhadap jurnalis merefleksikan penyusutan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Ketidakpuasan publik juga muncul di sektor pendidikan. Instruksi Presiden No 1/2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang memangkas lebih dari Rp 306 triliun belanja negara memicu gelombang protes #IndonesiaGelap. Gerakan ini menyoroti kebijakan populis Makan Bergizi Gratis yang justru menekan alokasi pendidikan tinggi dan memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia.

Di tengah berbagai permasalahan tersebut, partisipasi aktif orang muda membawa harapan bagi ruang perbaikan demokrasi. Gerakan sosial masih menjadi salah satu cara efektif untuk menunjukkan ketidakpuasaan, sekaligus kecintaan, orang muda terhadap negerinya, Indonesia. Baik secara daring maupun luring, gerakan-gerakan seperti #SaveRajaAmpat, #IndonesiaGelap, dan #TolakPPN12Persen berhasil memberikan tekanan besar kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang lebih pro-rakyat.

Pengantar (2)

Perbaikan demokrasi juga terjadi dalam ruang yang lebih formal. Selama 2025, Mahkamah Konstitusi setidaknya mengabulkan dua permohonan krusial mengenai penghapusan ambang batas presidensial dan pelaksanaan pemilu terpisah. Keputusan ini berpotensi besar memperbaiki sistem pemilu Indonesia dengan membuka ruang partisipasi bermakna secara lebih luas, termasuk membuka jalan bagi partai dan kandidat alternatif.

Pada akhirnya, laporan NBS Semester I 2025 ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membaca kesadaran, sikap, dan persepsi orang muda Indonesia. Temuan-temuan yang tersaji tidak hanya merekam kondisi, tetapi juga menggambarkan aspirasi orang muda terhadap perubahan yang lebih inklusif, adil, dan demokratis.

Kami percaya bahwa dengan melibatkan suara orang muda secara bermakna dalam proses pembuatan kebijakan, Indonesia dapat melangkah lebih dekat menuju cita-cita kemerdekaan: mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bebas dari ketidaksetaraan.

National Benchmark Survey

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) melakukan survei per enam bulan setiap tahunnya melalui ***National Benchmark Survey*** (NBS). Survei NBS ditujukan untuk memberikan wawasan mendalam tentang isu-isu utama yang dihadapi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan empat pilar isu PP17, yakni (anti)korupsi, hak asasi manusia, gender, dan lingkungan. Survei ini memantau kesadaran, sikap, dan persepsi orang muda dari waktu ke waktu. Dengan memetakan perubahan pola pikir orang muda, NBS memberikan pemahaman yang mendalam tentang tren dan dinamika sosial, sehingga dapat membantu mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong perubahan positif.

Hasil NBS dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan, organisasi, dan masyarakat luas untuk:

- ✓ memahami prioritas orang muda terkait isu-isu terkini, terutama terkait lingkungan, kesetaraan gender, korupsi, dan hak asasi manusia; serta bagi pemangku kepentingan untuk
- ✓ merumuskan langkah-langkah yang lebih terarah, responsif, dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan penting di Indonesia.

Tentang Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas

PP17, didirikan pada 2021, adalah yayasan yang independen, nirlaba, nonpartisan, dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau politisi manapun. Dalam PP17, kami memiliki misi untuk mendorong kebebasan berekspresi dan mendiskusikan berbagai ide dan pendapat, dengan tujuan memberdayakan orang muda untuk menjadi warga negara yang terinformasi dan secara aktif terlibat dalam komunitas mereka. Kami percaya bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah secara langsung mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, dan untuk itu, orang muda harus dibantu untuk membuat pilihan yang tepat.

Area fokus

- ✓ Pendidikan kewarganegaraan bagi pemilih dan orang muda.
- ✓ Transformasi digital untuk partisipasi orang muda dalam politik.
- ✓ Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas atas kebijakan pemerintah.
- ✓ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* dan isu politik terkini.

Pelopor Pilihan17

Ringkasan Temuan

Ringkasan Temuan (1)

Tingkat aktivisme:

- Tingkat aktivisme menunjukkan level partisipasi orang muda Indonesia dalam merespon isu-isu sosial dan politik selama setahun terakhir.
- Sebagian besar orang muda di Indonesia memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai isu-isu sosial dan politik yang relatif tinggi dengan komposisi *frontliner* (10%), *activist* (35%), *participant* (42%), *spectator* (13%), dan *uninterested* kurang dari 1%.
- Secara umum, saat ini orang muda sudah makin tertarik pada isu dibandingkan H2 2024. Peningkatan ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase *activist* (+10%) dan, di sisi lain, menurunnya *spectator* (-8%).
- Semakin tertarik orang muda dengan isu-isu (anti)korupsi, HAM, gender, dan lingkungan, semakin tinggi pula Tingkat aktivisme mereka. Ini dapat menunjukkan kesempatan untuk memupuk tingkat aktivisme orang muda dengan meningkatkan daya minat mereka.

Spektrum politik:

- Sebagian besar orang muda memiliki pandangan politik yang sudah cukup progresif (40%), progresif (35%), hingga sangat progresif (14%). Jumlah orang muda yang tergolong (sangat) progresif konsisten pada 49%. Artinya, orang muda Indonesia secara konsisten menaruh perhatian dan kepedulian pada nilai-nilai kesetaraan serta keadilan sosial.
- Seperti tingkat aktivisme, semakin tertarik orang muda terhadap suatu isu, semakin progresif pula mereka. Orang muda yang tertarik (53%) dan sangat tertarik (61%) dengan isu signifikan tergolong (sangat) progresif.
- Temuan ini menegaskan bahwa progresivitas orang muda bukan sekadar preferensi politik. Lebih-lebih, ini merupakan cerminan keterlibatan aktif mereka dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara.

Ringkasan Temuan (2)

Skala prioritas topik:

- Isu kesehatan (82%), pendidikan (80%), dan ekonomi (75%), dan keamanan (75%) tetap menjadi perhatian utama orang muda, baik enam bulan lalu maupun saat ini. Konsistensi ini mungkin dipengaruhi oleh maraknya pemberitaan seputar isu-isu tersebut. Misalkan, kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis yang berkaitan dengan topik kesehatan dan pendidikan.
- Topik (anti)korupsi (73%) menunjukkan peningkatan paling signifikan (+17%) di semester ini. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh maraknya kasus korupsi yang diungkap ke publik enam bulan belakangan.
- Selain (anti)korupsi, keamanan (75%) dan HAM (72%) menunjukkan peningkatan signifikan (keduanya +10%) dibandingkan semester lalu. Kenaikan ini tidak lepas dari berbagai peristiwa belakangan, seperti pembubaran aksi yang represif, pengesahan regulasi melalui proses legislasi yang tertutup, dan berbagai kasus lainnya, yang sangat bersinggungan dengan konteks keamanan dan HAM.

Skala kemarahan orang muda:

- Temuan dari skala kemarahan bisa menunjukkan seberapa besar peluang amarah dapat ditransformasikan menjadi partisipasi politik, aktivisme, atau solidaritas sosial.
- Antikorupsi (71%), kemiskinan (67%), dan ekonomi (62%) menjadi tiga topik teratas yang paling memicu kemarahan orang muda. (Anti)korupsi bukan hanya meningkat paling signifikan sebagai topik yang dianggap penting oleh orang muda, tetapi juga menjadi yang paling memicu kemarahan orang muda.
- Lebih lanjut, tingkat kemarahan orang muda sejalan dengan pandangan politik dan minat mereka terhadap isu. Mereka yang merasa sangat berminat terhadap isu (75%), serta tergolong progresif (66%) dan sangat progresif (75%). Ini menunjukkan bahwa kemarahan orang muda tidak sekadar ekspresi emosional, melainkan terkait erat dengan kesadaran politik dan kepedulian mereka terhadap isu publik.

Ringkasan Temuan (3)

Kesadaran orang muda terkait isu:

- Orang muda paling mengetahui isu penggunaan anggaran negara yang tidak transparan (42%) dan praktik nepotisme di jabatan pemerintahan (40%).
- Pelanggaran HAM masa lalu (48%) masih menjadi isu HAM terkait kebebasan sipil dan hak politik yang paling banyak diketahui orang muda, diikuti RUU yang dinilai memperkuat aparat (44%).
- Pada kategori keadilan sosial dan ekonomi, isu *bullying* (55%), minimnya perlindungan hukum bagi buruh/pekerja (44%), dan diskriminasi usia dalam pekerjaan (41%) menjadi yang paling disorot orang muda.
- Sebagian besar orang muda cenderung memaknai isu gender terutama sebagai persoalan kekerasan, seperti kekerasan dan pelecehan seksual (51%) serta kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (50%).
- Pada isu lingkungan, orang muda paling mengetahui isu cuaca ekstrem (66%) di kategori perubahan iklim, polusi udara (60%) terkait kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, serta polusi udara akibat PLTU (44%) pada kategori transisi energi.

Posisi orang muda terkait isu korupsi, HAM, lingkungan, dan gender:

- Orang muda memandang isu antikorupsi dan hak asasi manusia sebagai permasalahan yang sistemik, sedangkan isu lingkungan dan gender cenderung masih dalam skala individual.
- Memastikan koruptor tidak dapat mencalonkan diri dan menempati jabatan publik (46%) dan pemberlakuan aturan perampasan asset terduga koruptor (45%) menjadi dua aspirasi kebijakan antikorupsi yang disuarakan orang muda.
- Terkait HAM, orang muda paling menginginkan pengawasan yang tegas pada aparat penegak hukum (46%), disusul dengan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi (44%).
- Kekerasan dan pelecehan seksual konsisten menjadi isu gender yang paling diketahui dan dianggap sebagai tantangan utama bagi orang muda, sehingga mereka menginginkan kebijakan yang dapat mencegah kekerasan dan pelecehan seksual (55%).
- Perlindungan kawasan hutan (53%) dan pengakuan hutan adat (34%) menjadi dua kebijakan terkait perlindungan lingkungan yang diaspirasikan orang muda untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah.

Ringkasan Temuan (4)

Penilaian orang muda terhadap peran pemerintah:

- Orang muda menganggap pemerintah pusat (71%) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
- Terdapat korelasi antara ketertarikan dan spektrum politik orang muda dengan penilaian mereka terhadap peran pemerintah. Semakin tertarik dan progresif mereka, semakin rendah pula penilaiannya terhadap peran pemerintah.
- Meski memiliki peran yang sangat krusial, orang muda menilai kinerja pemerintah masih (jauh) di bawah ekspektasi, terutama terkait antikorupsi (NET score: -77%).
- Penurunan NET Score paling signifikan terlihat di lingkungan (-41%) dan gender (-40%).

Kesediaan orang muda untuk terlibat dalam aktivisme:

- Sebagian besar anak muda tertarik untuk terlibat dalam aktivitas terkait antikorupsi (73%), lingkungan (59%), HAM (59%), dan gender (55%).
- Meski demikian, aspirasi keterlibatan mereka terhambat oleh rasa takut (50%) dan minimnya informasi (25%).
- Rasa takut mereka terbagi menjadi takut untuk dianggap sok tahu (19%), takut untuk berbeda pendapat (18%), dan takut untuk berpartisipasi (13%).
- Dorongan utama orang muda untuk berpartisipasi berasal dari kesadaran bahwa isu tersebut penting dan berdampak (34%) serta rasa tanggung jawab mereka sebagai warga negara (34%).
- Bentuk partisipasi yang diminati antara lain melapor pelanggaran (28%), memberi usulan kebijakan (27%), dan bergabung dengan organisasi atau gerakan (26%). Bentuk-bentuk kegiatan ini menunjukkan keinginan kuat mereka untuk menyuarakan aspirasi secara langsung dan ikut andil dalam mengubah kebijakan pemerintah.

Pelopor Pilihan17

Tingkat Aktivisme

Skala Klasifikasi Aktivisme Lingkungan

Nice to know

Total skor dihitung dengan menjumlahkan nilai dari setiap indikator, dengan skor maksimum 100. Skor yang lebih tinggi mencerminkan tingkat kesadaran dan keterlibatan yang lebih tinggi dalam isu tersebut.

Kelompok "*uninterested/spectator*" adalah mereka yang jarang terlibat dalam aktivitas terkait, sedangkan "*activist/frontliner*" adalah mereka yang aktif dan sering terpapar isu serta kegiatan terkait.

Frontliner *Frontliner* adalah orang-orang ini kemungkinan besar menjadi inti gerakan: mereka aktif mengikuti berita, mendiskusikan isu, berpartisipasi dalam kegiatan, merespons kebijakan, dan terlibat dalam organisasi terkait.

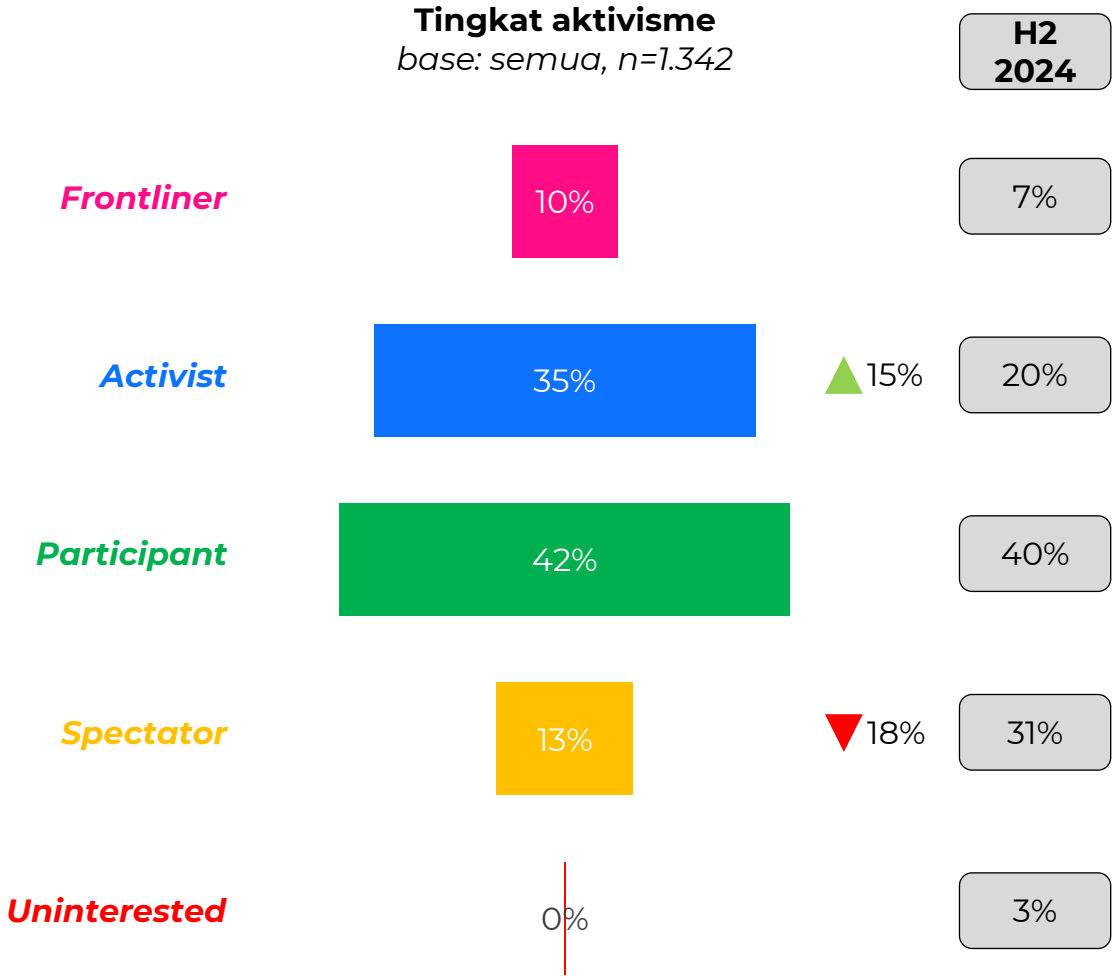
Activist *Activist* tidak seaktif *Frontliner*. Namun, *Activist* tetap menyadari isu tersebut melalui berita, mendiskusikannya dengan teman dan keluarga, serta sering terlibat dalam beberapa kegiatan yang terorganisir.

Participant *Participant* adalah mereka yang tertarik pada isu seperti lingkungan, HAM, gender, dan korupsi, serta mengikuti perkembangannya melalui berita atau diskusi, namun dengan keterlibatan yang terbatas.

Spectator *Spectator* adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dasar tentang isu, serta menunjukkan kepedulian sebagai warga negara dengan setidaknya berpartisipasi dalam aktivitas seperti pemilu atau pemungutan suara.

Uninterested *Uninterested* adalah mereka yang minim atau tidak menyadari isu serta hampir tidak terlibat dalam diskusi atau aktivitas politik, sosial, maupun lingkungan.

Sebagian besar orang muda tergolong *participant* (42%) dan *activist* (35%). Artinya, mereka semakin tertarik pada isu-isu lingkungan, HAM, gender, dan korupsi, serta mengikuti perkembangannya melalui berita atau diskusi.



Tingkat aktivisme menunjukkan level partisipasi orang muda Indonesia dalam merespon isu-isu sosial dan politik selama setahun terakhir. Di semester pertama 2025 ini, orang muda Indonesia (mereka yang berusia 17-35 tahun) termasuk (sangat) aktif ketika dihadapkan pada isu-isu sosial dan politik. Mereka bukan hanya sadar terhadap isu, tetapi juga sudah mulai aktif terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan.

Frontliners signifikan lebih tinggi terdiri dari laki-laki (11%), mereka yang bekerja sebagai karyawan swata/PNS (13%), memiliki minat paling tinggi (18%), dan merasa sangat marah terhadap beberapa isu (15%).

Activist signifikan berada di area perkotaan (38%), merasa tertarik (38%) dan sangat tertarik (49%) dengan isu, serta termasuk sangat progresif (45%) dalam spektrum politik.

Participant signifikan berada di area pedesaan (47%), merupakan pelajar (50%), *fresh graduates* (53%), dan ibu rumah tangga (50%). Partisipan mereka merasa agak tertarik (54%) dan agak marah (49%) terhadap beberapa isu.

Spectator signifikan berada di Nusa Tenggara (27%), ibu rumah tangga (19%), merasa sangat tidak tertarik (39%), tidak tertarik (38%), dan agak tertarik (19%), serta memiliki pandangan cukup progresif (16%).

TA05 Dalam satu bulan terakhir, seberapa sering kamu melihat informasi/berita terkait isu sosial-politik?
TA06 Dalam satu bulan terakhir, seberapa sering kamu berdiskusi tentang isu sosial-politik dengan teman atau keluarga?
TA07 Dalam satu tahun terakhir, seberapa sering kamu berpartisipasi dalam aktivitas yang mengangkat isu sosial-politik?
TA08 Dalam satu tahun terakhir, apakah kamu pernah bergabung dengan kelompok atau organisasi yang fokus pada isu-isu sosial-politik?
TA09 Manakah yang paling menggambarkan reaksi kamu jika ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pendapatmu?

Frontliner

10%

Perempuan	41%
Laki-laki	59%

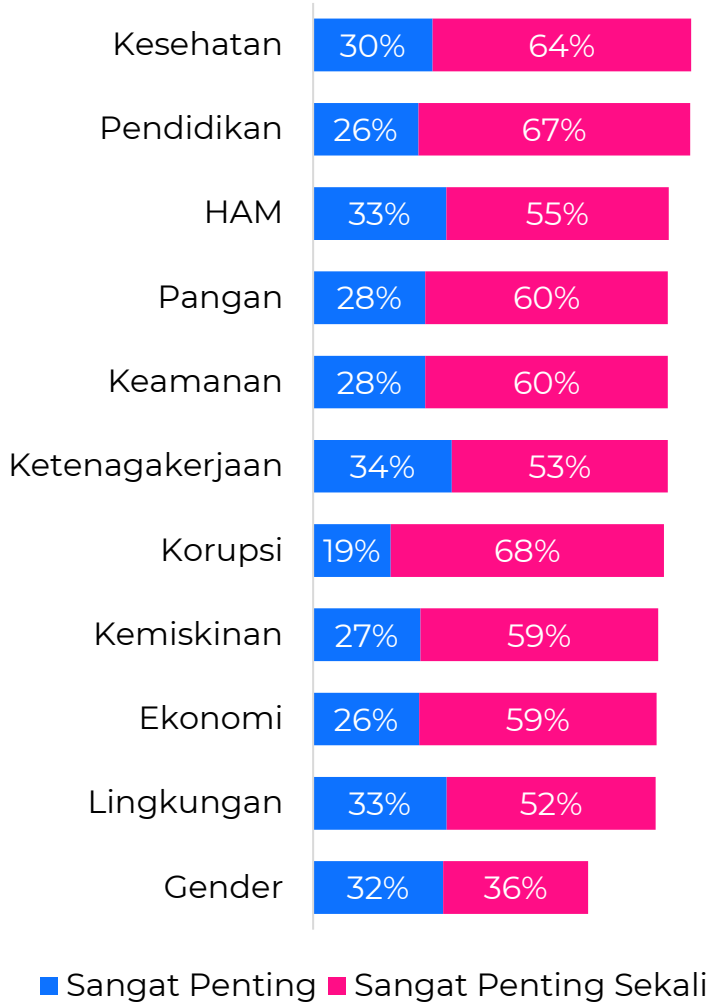
≤ 20	9%	26-30	35%
21-25	33%	≥ 31	23%



Sumatera	11%
Jawa	68%
Nusa Tenggara	6%
Kalimantan	8%
Sulawesi	6%
Lainnya	1%

Perkotaan	70%
Pedesaan	30%

Skala prioritas topik
base: frontliner, n=132



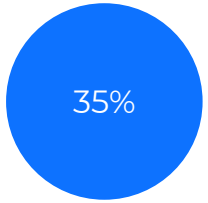
Minat untuk terlibat
base: frontliner, n=132

Minat untuk terlibat	
Bergabung organisasi/gerakan	28%
Mengikuti program perihal isu tsb	28%
Melapor jika melihat pelanggaran	28%
Memberikan usulan kebijakan	25%
Ikut terlibat aksi atau protes	25%

Alasan belum terlibat
base: frontliner, n=132

Alasan tidak ingin terlibat	
Takut berbeda pendapat	28%
Perlu sertifikasi/pendidikan khusus	28%
Kurang informasi untuk partisipasi	28%
Kurang dirasa penting/mendesak	25%
Takut dianggap sok tahu	25%

Activist



Perempuan	48%
Laki-laki	52%

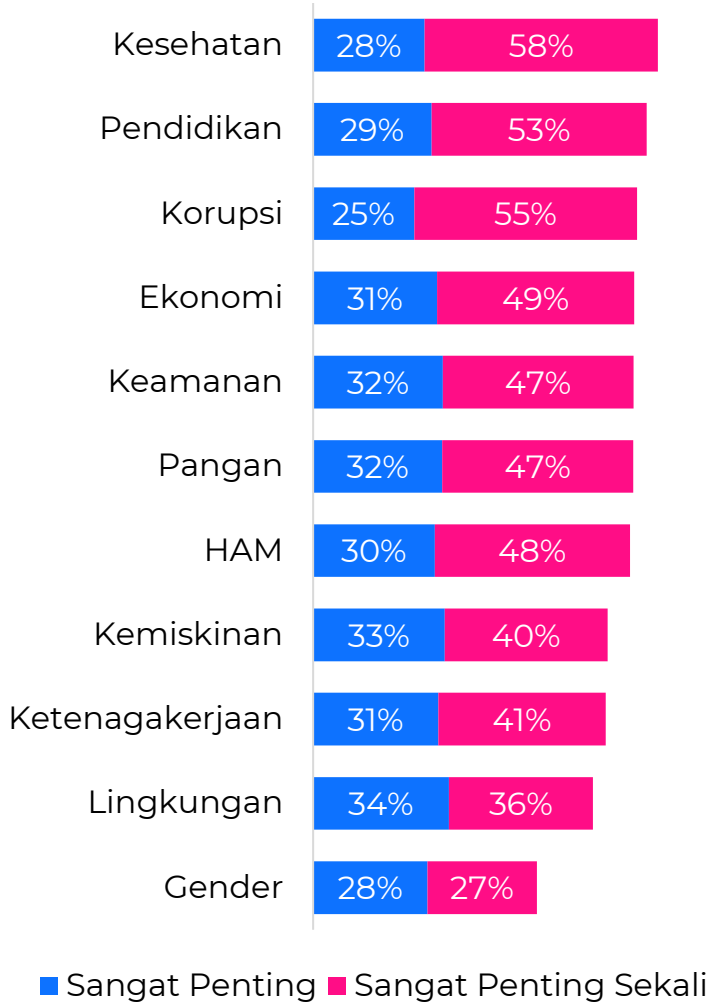
≤ 20	8%	26-30	36%
21-25	28%	≥ 31	28%



Sumatera	19%
Jawa	60%
Nusa Tenggara	5%
Kalimantan	6%
Sulawesi	8%
Lainnya	2%

Perkotaan	71%
Pedesaan	29%

Skala prioritas topik
base: activist, n=476



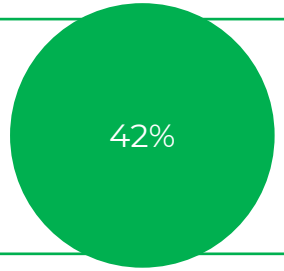
Minat untuk terlibat
base: activist, n=476

Minat untuk terlibat	
Bergabung organisasi/gerakan	33%
Memberikan usulan atas kebijakan	31%
Melapor jika melihat pelanggaran	28%
Menandatangani petisi	24%
Mengikuti program perihal isu tsb	23%

Alasan belum terlibat
base: activist, n=476

Alasan tidak ingin terlibat	
Kurang informasi untuk partisipasi	34%
Takut dianggap sok tahu	22%
Takut berbeda pendapat	20%
Merasa kurang kemampuan	19%
Tidak didorong oleh pemerintah	19%

Participant



Perempuan	52%
Laki-laki	48%

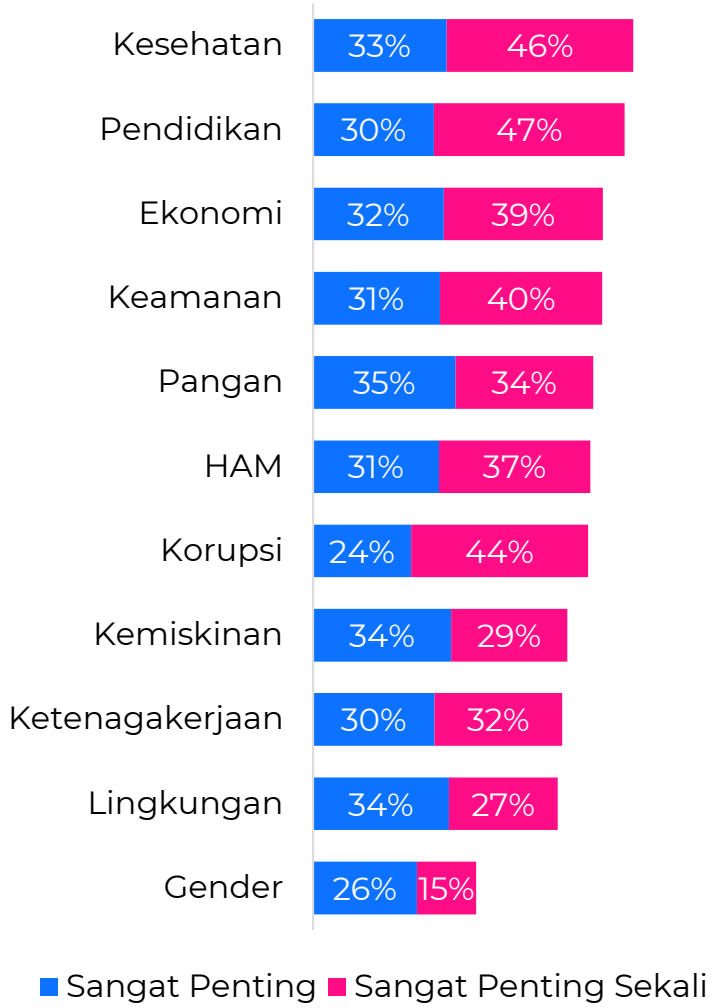
≤ 20	11%	26-30	37%
21-25	27%	≥ 31	25%



Sumatera	19%
Jawa	60%
Nusa Tenggara	5%
Kalimantan	5%
Sulawesi	9%
Lainnya	1%

Perkotaan	62%
Pedesaan	38%

Skala prioritas topik
base: participant, n=563



Minat untuk terlibat
base: participant, n=563

Minat untuk terlibat	
Melapor jika melihat pelanggaran	29%
Memberikan usulan atas kebijakan	27%
Membuat konten medsos edukatif	22%
Menandatangani petisi	22%
Bergabung organisasi/Gerakan	21%

Alasan belum terlibat
base: participant, n=563

Alasan tidak ingin terlibat	
Kurang informasi untuk partisipasi	23%
Merasa kurang kemampuan	22%
Takut dianggap sok tahu	21%
Takut berbeda pendapat	18%
Tidak punya waktu	18%

Spectator

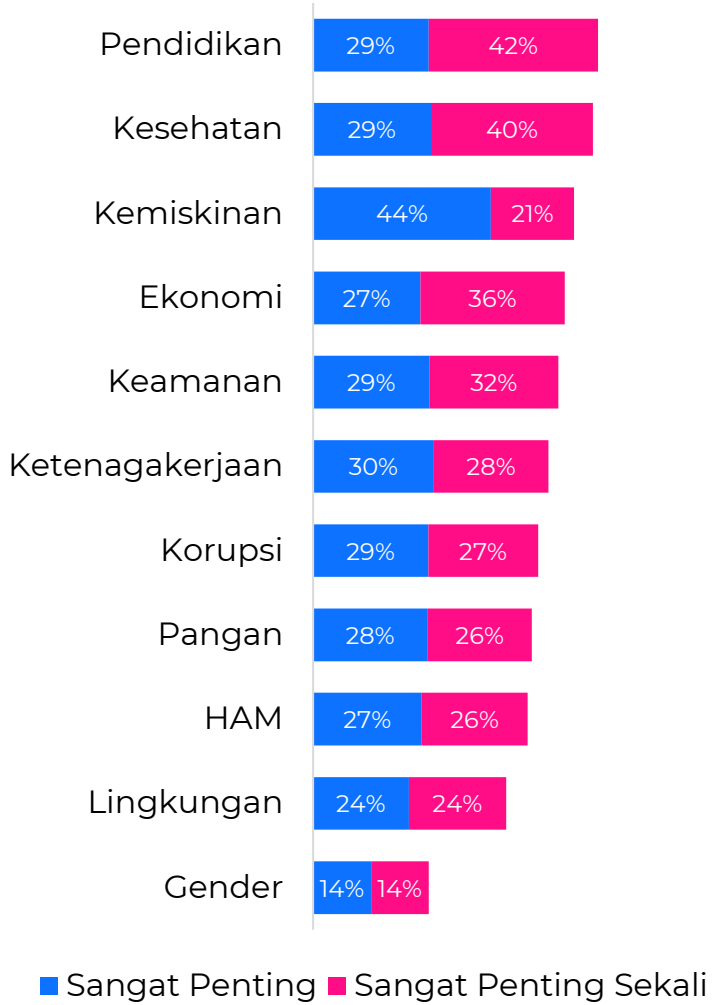
13%

Perempuan	49%		
Laki-laki	51%		
≤ 20	7%	26-30	46%
21-25	21%	≥ 31	27%



Sumatera	20%
Jawa	54%
Nusa Tenggara	13%
Kalimantan	6%
Sulawesi	5%
Lainnya	1%
Perkotaan	64%
Pedesaan	36%

Skala prioritas topik
base: spectator, n=170



Minat untuk terlibat
base: spectator, n=170

Minat untuk terlibat	
Melapor jika melihat pelanggaran	29%
Membuat konten medsos edukatif	20%
Menyumbang/berdonasi	19%
Memberikan usulan kebijakan	18%
Menandatangi petisi	17%

Alasan belum terlibat
base: spectator, n=170

Alasan tidak ingin terlibat	
Marasa kurang kemampuan	27%
Tidak punya waktu	24%
Tidak tahu mulai dari mana	21%
Kurang informasi untuk partisipasi	19%
Takut untuk berpartisipasi	14%

Pelopor Pilihan17

Spektrum Politik

Skala Klasifikasi Spektrum Politik

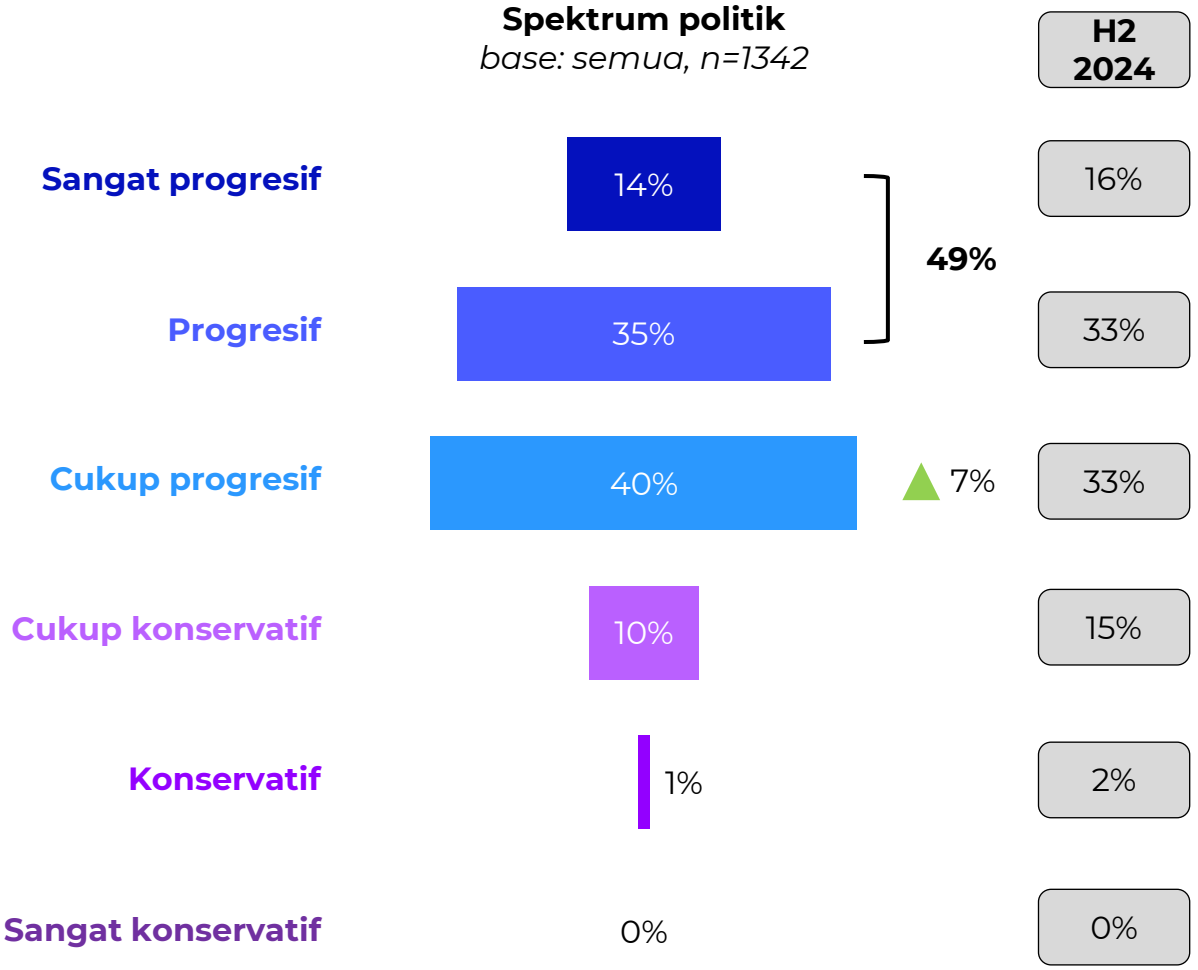
Nice to know

Total skor dihitung dengan menjumlahkan nilai dari setiap indikator, dengan skor maksimum 100. Skor yang lebih tinggi mencerminkan tingkat progresivitas yang lebih tinggi pula dalam isu-isu sosial dan politik.

Kelompok “sangat konservatif” adalah mereka yang paling tidak terbuka dengan nilai kesetaraan dan keadilan sosial serta lebih menekankan pada peran individu dibandingkan negara (sistem). Di sisi lain, kelompok “sangat progresif” paling peduli dengan pemerataan keadilan sosial, serta meyakini bahwa perubahan harus dilakukan secara sistemik.

Sangat progresif	Kelompok ini sangat peduli dengan pemerataan atas kesetaraan dan keadilan sosial, serta mendukung kebijakan dan peran negara dalam mengurangi kesenjangan sosial.
Progresif	Seperti sangat progresif, kelompok progresif menghargai kesetaraan dan keadilan sosial. Kelompok ini juga percaya terhadap peran negara atau pemerintah.
Cukup progresif	Cukup progresif juga setuju dengan nilai-nilai keadilan sosial dan mendukung kebijakan untuk mengurangi kesenjangan. Kelompok ini mulai menyoroti peran individu dalam perubahan sosial.
Cukup konservatif	Berbeda dengan cukup progresif, mereka yang cukup konservatif cenderung mengarah pada konservatisme, seperti mengenai peran individu, intervensi negara, dan nilai-nilai kesetaraan.
Konservatif	Konservatif cenderung tidak memiliki pandangan yang terbuka terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Mereka lebih percaya terhadap peran individu dibandingkan pemerintah dalam mewujudkan perubahan.
Sangat konservatif	Kelompok sangat konservatif tidak memiliki pandangan yang terbuka terhadap kesetaraan dan keadilan sosial. Mereka juga percaya bahwa individu dapat berperan lebih banyak dibandingkan negara atau pemerintah.

Spektrum Politik Orang Muda



Masih seperti temuan H2 2024, 1 dari 2 anak muda Indonesia cenderung memiliki pandangan (sangat) progresif. Sebanyak 49% di antaranya tergolong sangat progresif atau progresif, dengan tambahan 40% berada di posisi sentris yang condong ke arah progresif. Temuan ini menunjukkan bahwa orang muda Indonesia secara konsisten menaruh perhatian dan kepedulian pada nilai-nilai kesetaraan serta keadilan sosial.

Orang muda tidak hanya kritis terhadap upaya pemerintah terkait isu-isu penting, tetapi juga memiliki kesadaran introspektif yang mendalam. Pengujian skala progresif-konservatif mengidentifikasi enam kelompok utama, yaitu: (1) sangat progresif, (2) progresif, (3) cukup progresif, (4) cukup konservatif, (5) konservatif, dan (6) sangat konservatif. Hal ini mencerminkan kecenderungan generasi muda untuk mendukung kesetaraan dan keadilan sosial, serta perubahan secara sistemik daripada individu.

Semakin tertarik orang muda terhadap suatu isu, semakin progresif pula mereka. Orang muda yang tertarik (53%) dan sangat tertarik (61%) dengan isu signifikan tergolong (sangat) progresif. Temuan ini menegaskan bahwa progresivitas orang muda bukan sekadar preferensi politik. Lebih-lebih, ini merupakan cerminan keterlibatan aktif mereka dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara.

Sangat Progresif

14%

Perempuan	46%
Laki-laki	54%

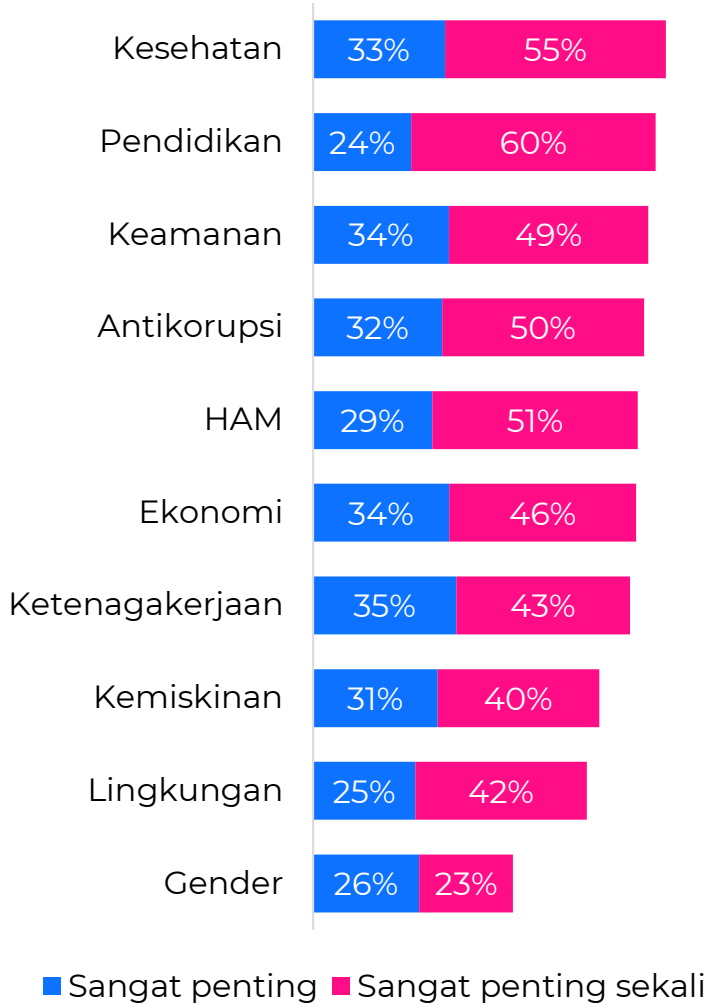
≤ 20	9%	26-30	32%
21-25	35%	≥ 31	23%



Sumatera	19%
Jawa	62%
Nusa Tenggara	5%
Kalimantan	5%
Sulawesi	8%
Lainnya	1%

Perkotaan	73%
Pedesaan	27%

Skala prioritas topik
base: sangat progresif, n=204



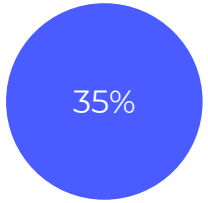
Minat untuk terlibat
base: sangat progresif, n=204

Minat untuk terlibat	
Melapor jika melihat pelanggaran	36%
Memberikan usulan atas kebijakan	30%
Menandatangani petisi	29%
Bergabung organisasi/gerakan	27%
Membuat konten medsos edukatif	25%

Alasan belum terlibat
base: sangat progresif, n=204

Alasan tidak ingin terlibat	
Kurang informasi untuk partisipasi	28%
Merasa kurang kemampuan	27%
Takut berbeda pendapat	26%
Takut dianggap sok tahu	22%
Tidak tahu mulai dari mana	21%

Progresif



Perempuan	52%
Laki-laki	48%

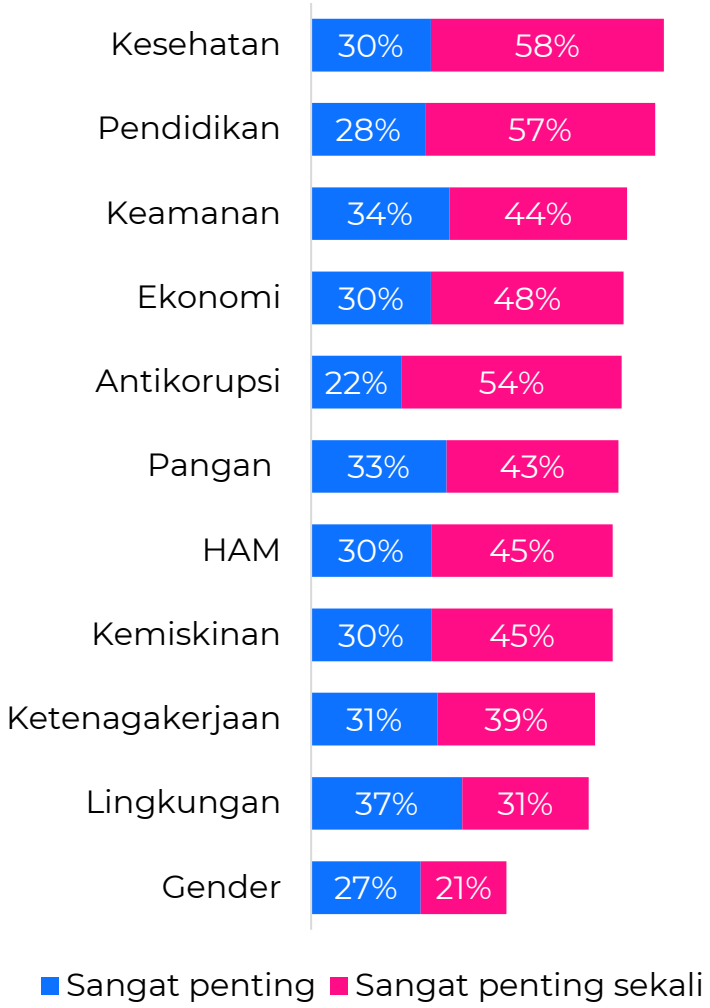
≤ 20	9%	26-30	35%
21-25	28%	≥ 31	28%



Sumatera	17%
Jawa	62%
Nusa Tenggara	5%
Kalimantan	5%
Sulawesi	7%
Lainnya	4%

Perkotaan	68%
Pedesaan	32%

Skala prioritas topik
base: progresif, n=473



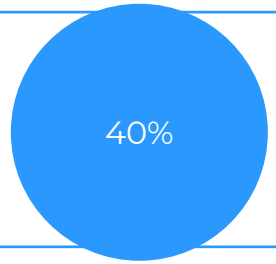
Minat untuk terlibat
base: progresif, n=473

Minat untuk terlibat	
Menandatangani petisi	28%
Memberikan usulan kebijakan	28%
Melapor jika melihat pelanggaran	27%
Bergabung organisasi/gerakan	24%
Membuat konten medsos edukatif	23%

Alasan tidak terlibat
base: progresif, n=473

Alasan tidak ingin terlibat	
Kurang informasi untuk partisipasi	25%
Merasa kurang kemampuan	24%
Takut dianggap sok tahu	22%
Tidak tahu mulai dari mana	21%
Tidak punya waktu	21%

Cukup Progresif



Perempuan	52%
Laki-laki	48%

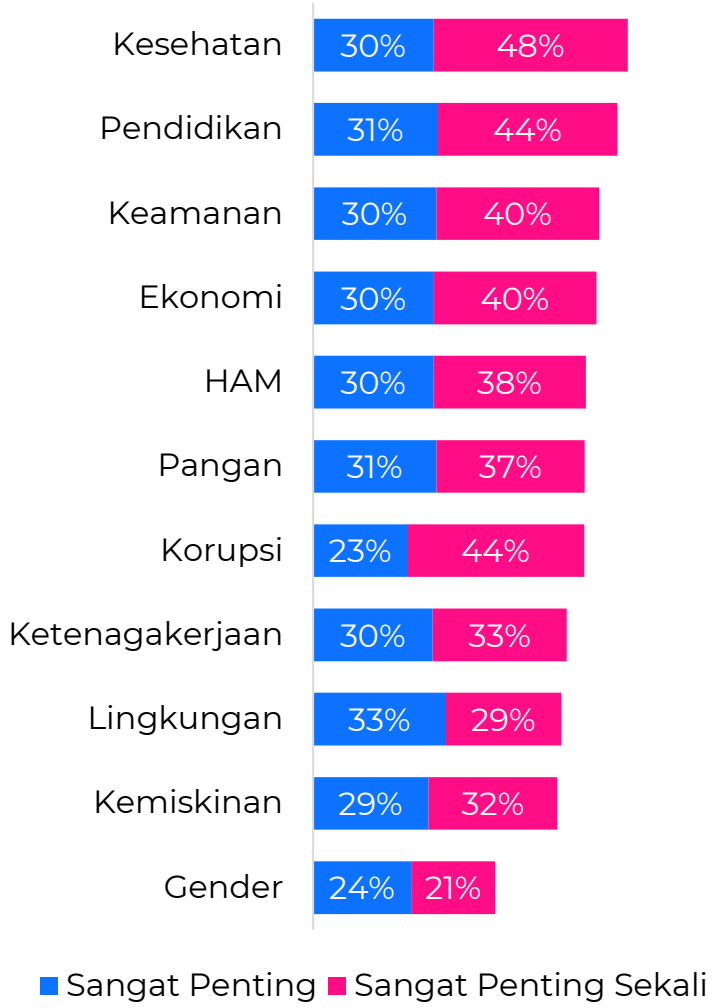
≤ 20	10%	26-30	41%
21-25	20%	≥ 31	24%



Sumatera	21%
Jawa	57%
Nusa Tenggara	7%
Kalimantan	6%
Sulawesi	9%
Lainnya	0%

Perkotaan	63%
Pedesaan	37%

Skala prioritas topik
base: cukup progresif, n=524



Minat untuk terlibat
base: cukup progresif, n=524

Minat untuk terlibat	
Melapor jika melihat pelanggaran	28%
Memberikan usulan kebijakan	27%
Bergabung organisasi/gerakan	26%
Mengikuti program perihal isu tsb	22%
Membuat konten medsos edukatif	19%

Alasan tidak terlibat
base: cukup progresif, n=524

Alasan tidak ingin terlibat	
Kurang informasi untuk partisipasi	26%
Tidak punya waktu	19%
Tidak tahu mulai dari mana	19%
Takut dianggap sok tahu	18%
Merasa kurang kemampuan	18%

Cukup Konservatif

10%

Perempuan	38%
Laki-laki	62%

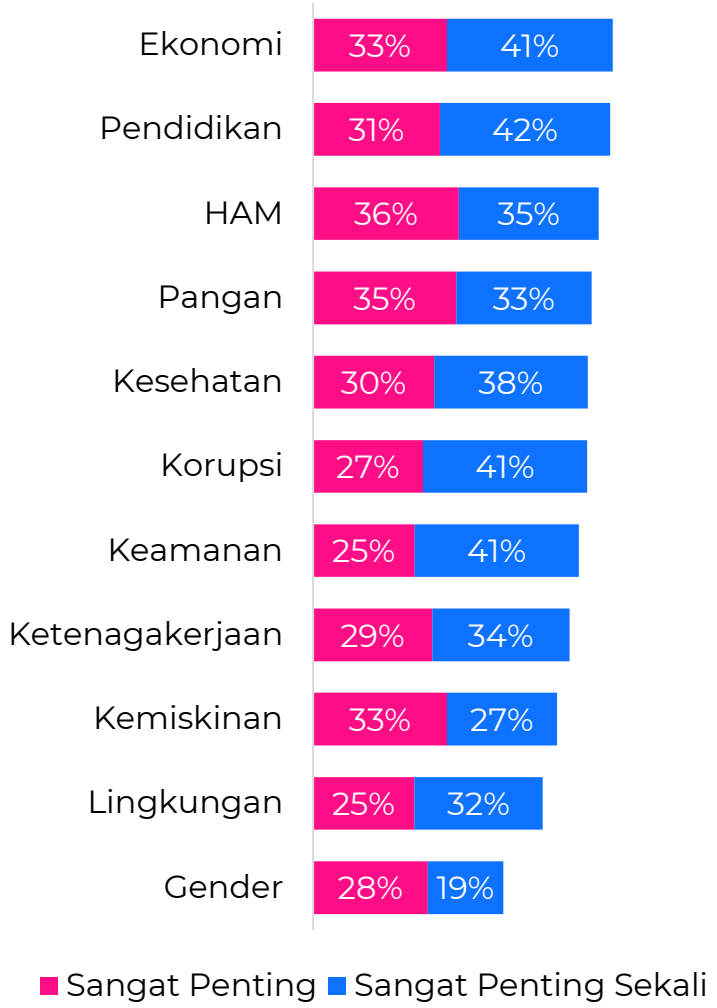
≤ 20	10%	26-30	41%
21-25	20%	≥ 31	29%



Sumatera	14%
Jawa	63%
Nusa Tenggara	6%
Kalimantan	9%
Sulawesi	6%
Lainnya	1%

Perkotaan	65%
Pedesaan	35%

Skala prioritas topik
base: cukup konservatif, n=131



Minat untuk terlibat
base: cukup konservatif, n=131

Minat untuk terlibat	
Memberikan usulan atas kebijakan	27%
Melapor jika melihat pelanggaran	27%
Bergabung organisasi/gerakan	26%
Mengikuti program perihal isu tsb	25%
Membuat konten medsos edukatif	18%

Alasan tidak terlibat
base: cukup konservatif, n=131

Alasan tidak ingin terlibat	
Merasa kurang kemampuan	25%
Kurang informasi untuk partisipasi	23%
Takut berbeda pendapat	22%
Perlu sertifikasi/pendidikan khusus	19%
Kurang dirasa penting/mendesak	19%

Konservatif

1%

Perempuan	13%
Laki-laki	87%

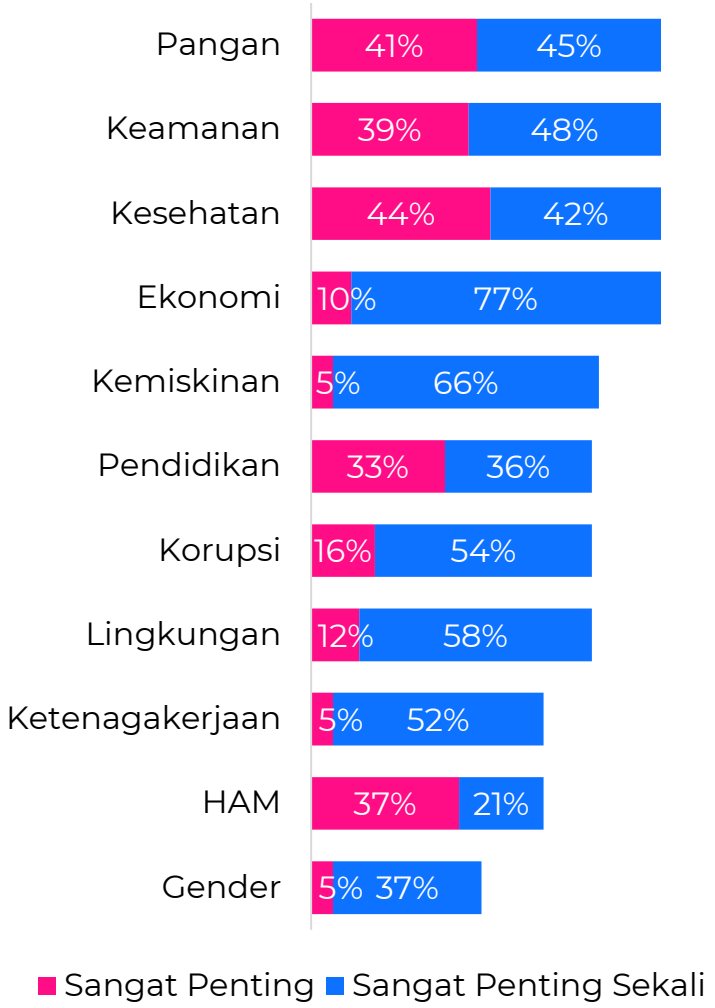
≤ 20	5%	26-30	49%
21-25	20%	≥ 31	26%



Sumatera	20%
Jawa	35%
Nusa Tenggara	29%
Kalimantan	0%
Sulawesi	15%
Lainnya	0%

Perkotaan	41%
Pedesaan	59%

Skala prioritas topik
base: konservatif, n=10



Minat untuk terlibat
base: konservatif, n=10

Minat untuk terlibat	
Bergabung organisasi/gerakan	41%
Membuat konten medsos edukatif	30%
Menguji kebijakan atau peraturan	26%
Melapor jika melihat pelanggaran	19%
Ikut terlibat aksi atau protes	19%

Alasan tidak terlibat
base: konservatif, n=10

Alasan tidak ingin terlibat	
Isu tidak relevan	38%
Kurang dirasa penting	36%
Perlu sertifikasi/pendidikan khusus	27%
Lingkungan tidak membicarakan	20%
Takut berbeda pendapat	19%

Pandangan Progresif-Konservatif Orang Muda (1)

Pandangan progresif-konservatif
base: semua, n=1.342

	Progresif	% P	% Netral	% K	Konservatif
Pajak	Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi harus membayar tarif pajak yang lebih besar	58%	24%	18%	Semua individu harus membayar tarif pajak yang sama
Sistem peradilan	Sistem peradilan harus membantu rehabilitasi narapidana (kriminal) sehingga dapat kembali berkontribusi untuk Masyarakat	22%	17%	60%	Sistem peradilan harus menghukum narapidana (kriminal), sehingga menciptakan efek jera
Keadilan sosial	Semua orang memiliki hak yang sama dalam menerima bantuan dari pemerintah	47%	24%	28%	Semua orang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan sendiri, tanpa banyak bantuan dari pemerintah
Intervensi aparat	Jumlah aparat pemerintah boleh banyak, yang penting dapat melindungi kelompok marginal	54%	23%	23%	Jumlah aparat pemerintah harus sesedikit mungkin, sejauh bisa melakukan pekerjaannya
Perlindungan lingkungan	Pemerintah harus lebih banyak turun tangan dan mengambil kendali dalam rangka melindungi lingkungan	63%	19%	18%	Pemerintah dapat ikut campur dalam urusan pribadi individu demi menjaga ketertiban umum
Intervensi negara	Pemerintah seharusnya menghormati urusan pribadi individu dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat publik	50%	26%	23%	Pemerintah dapat ikut campur dalam urusan pribadi individu demi menjaga ketertiban umum
Media sosial	Pemerintah seharusnya melakukan edukasi penggunaan medsos secara bijak kepada masyarakat daripada membatasi konten medsos	44%	19%	37%	Pemerintah seharusnya mengawasi dan membatasi media sosial agar konten medsos dapat dibatasi.

Pandangan Progresif-Konservatif Orang Muda (2)

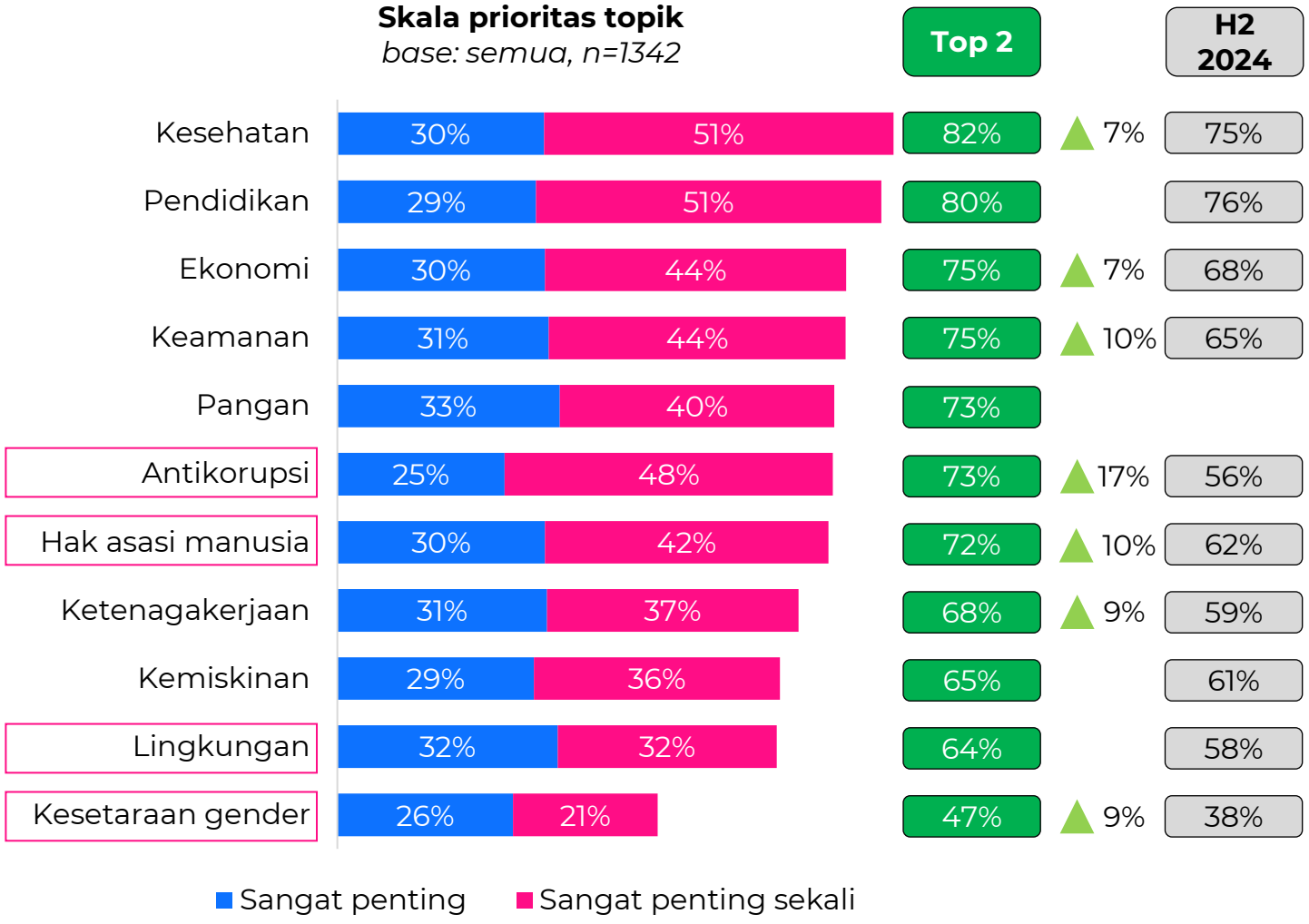
Pandangan progresif-konservatif
base: semua, n=1.342

	Progresif	% P	% Netral	% K	Konservatif
Pemanfaatan hutan	Tanah, wilayah, dan hutan adat tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan industri, tambang, dan komersial, yang bertentangan dengan kebutuhan dan nilai Masyarakat Adat	62%	21%	17%	Selama berada di Indonesia, semua tanah, wilayah, dan hutan boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh negara untuk kebutuhan industri, tambang, dan komersial
Isu lingkungan	Manusia sangat bergantung dengan alam, sehingga kita seharusnya menjaga ketersediaan dan keberlanjutan alam.	65%	18%	17%	Alam ada untuk manusia, sehingga perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia.
Isu HAM	Negara seharusnya tidak mencampuri urusan privat warganya (seperti agama, pernikahan, orientasi seksual, dll) untuk menjaga kebebasan dan perlindungan individu.	36%	28%	37%	Negara boleh mencampuri urusan privat dan kebebasan individu, termasuk agama, pernikahan, orientasi seksual, untuk mempertahankan ketertiban dan norma sosial.
Isu gender	Perempuan dan laki-laki seharusnya mendapatkan akses dan kesempatan yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik.	71%	16%	14%	Perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat, sehingga tidak perlu diperlakukan secara setara dalam segala hal.
Isu korupsi	Upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif melalui pemulihan independensi KPK, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan reformasi kelembagaan.	66%	19%	15%	Penangkapan dan operasi tangkap tangan (OTT) sudah cukup efektif untuk menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia.

Pelopor Pilihan17

Topik Penting Bagi Orang Muda di Indonesia

Di semester I 2025, semakin banyak topik yang dianggap sangat penting (sekali) oleh orang muda. Dibandingkan semester lalu, beberapa isu, terutama antikorupsi, mengalami peningkatan paling signifikan (+17%)



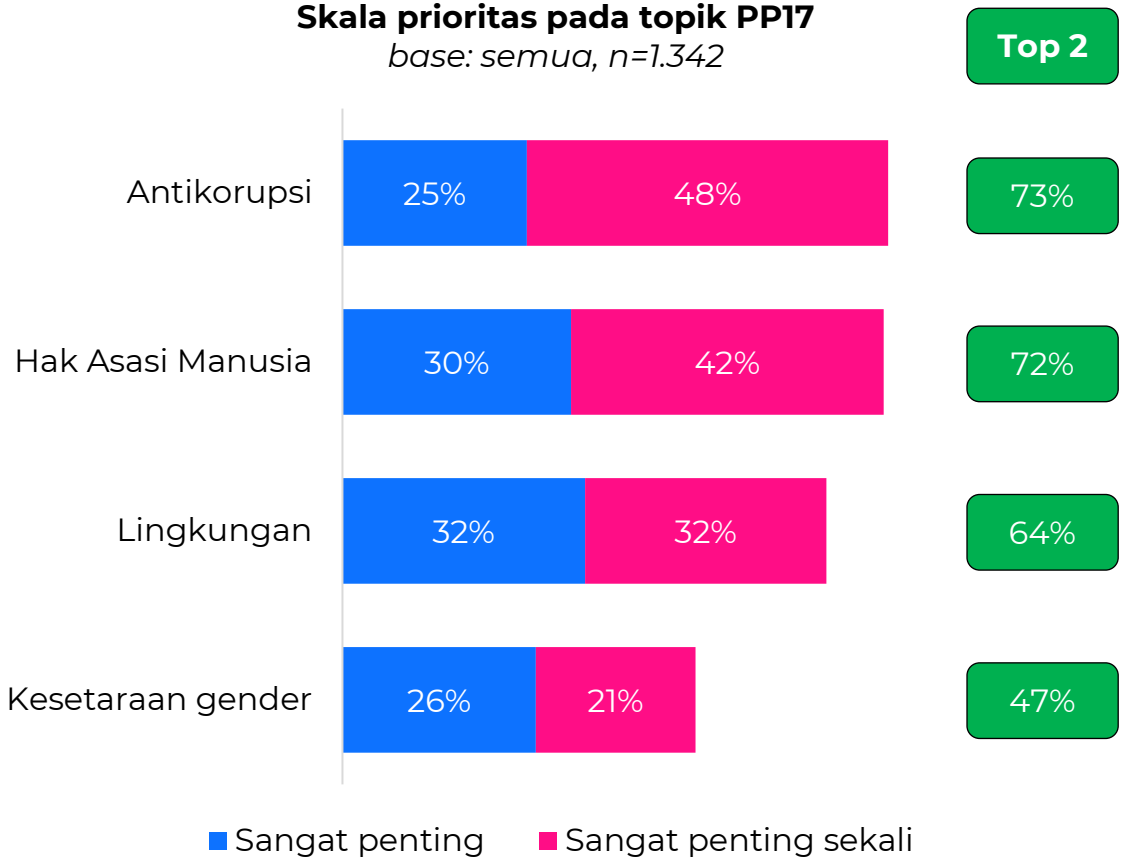
Isu kesehatan (82%), pendidikan (80%), dan ekonomi (75%), dan keamanan (75%) tetap menjadi perhatian utama orang muda, baik enam bulan lalu maupun saat ini. Konsistensi ini mungkin dipengaruhi oleh maraknya pemberitaan seputar isu-isu tersebut. Misalkan, kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis yang berkaitan dengan topik kesehatan dan pendidikan.

Topik (anti)korupsi (73%) menunjukkan peningkatan paling signifikan (+17%) di semester ini. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh maraknya kasus korupsi yang diungkap ke publik enam bulan belakangan. Selain topik tersebut, keamanan (75%) dan HAM (72%) menunjukkan peningkatan signifikan (keduanya +10%) dibandingkan semester lalu. Kenaikan ini tidak lepas dari berbagai peristiwa belakangan, seperti pembubaran aksi yang represif, pengesahan regulasi melalui proses legislasi yang tertutup, dan berbagai kasus lainnya, yang sangat bersinggungan dengan konteks keamanan dan HAM.

Q01 Seberapa penting kamu menilai topik-topik di bawah ini?

Di antara empat isu PP17, antikorupsi (48%) menjadi topik yang dianggap sangat penting sekali bagi orang muda. Topik ini juga menempati posisi teratas (73%) di skala prioritas dibandingkan HAM, lingkungan, dan gender. Isu gender sendiri konsisten tidak terlalu menjadi prioritas bagi orang muda.

Skala prioritas pada topik PP17
base: semua, n=1.342



Isu antikorupsi dianggap sangat penting (sekali) terutama oleh usia ≤ 20 tahun (82%), pelajar (81%), *fresh graduates* (81%), tergolong *activist* (80%), *frontliner* (87%), progresif (77%), sangat progresif (82%), merasa sangat marah (86%), dan sangat tertarik (91%) terhadap isu.

Isu gender dianggap sangat penting, terutama bagi perempuan (52%), mereka yang tinggal di Nusa Tenggara (61%), pelajar (56%), tergolong *activist* (55%) dan *frontliner* (68%), progresif (77%), sangat progresif (82%), mereka sangat tertarik (91%) dan tertarik (71%) terhadap isu

Isu lingkungan dianggap sangat penting (sekali), terutama bagi mereka yang memiliki pendidikan dasar dan menengah (66%), pelajar (75%), tergolong *activist* (69%) dan *frontliner* (85%), mereka yang progresif (69%), sangat marah dan sangat tidak marah (keduanya 73%), serta sangat tertarik (87%)

Isu HAM dianggap sangat penting (sekali) terutama oleh usia 21-25 (80%), mereka yang tinggal di Sulawesi (81%), pelajar (78%), *fresh graduates* (82%), *activist* (78%), *frontliner* (88%), preogresif (45%) dan sangat progresif (51%), serta mereka yang merasa sangat tertarik dengan isu HAM (63%)

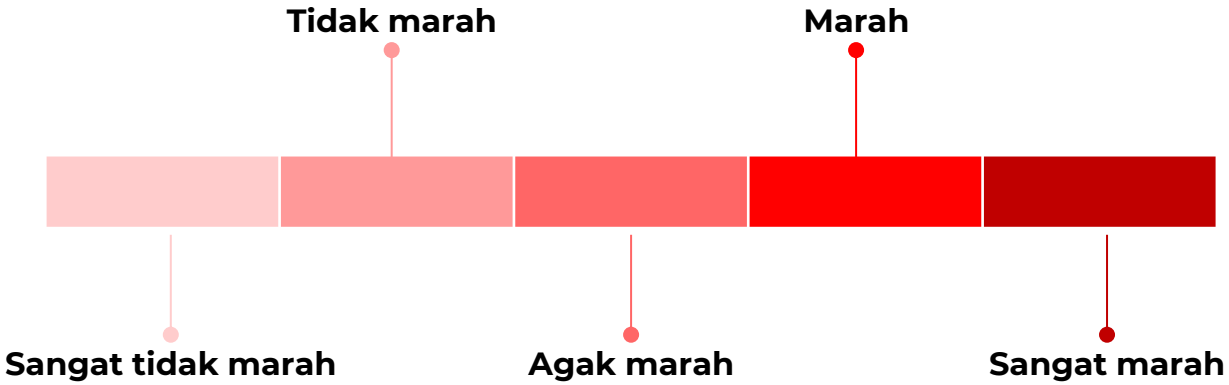
Q01 Seberapa penting kamu menilai topik-topik di bawah ini?

Skala Klasifikasi Kemarahan

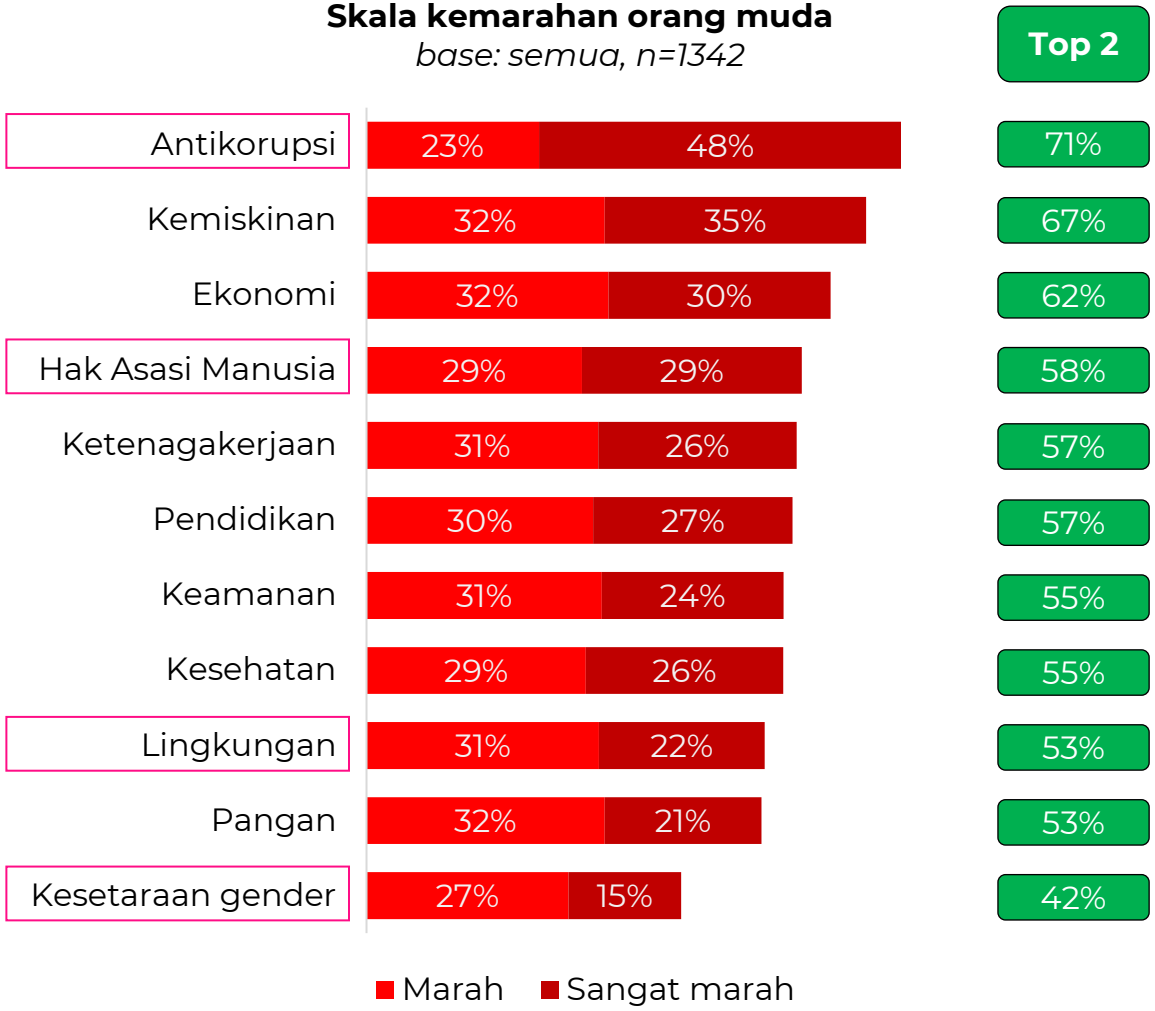
Nice to know

Skala kemarahan digunakan untuk memahami berbagai tingkat kemarahan orang muda. Melalui skala ini, kemarahan orang muda dianggap mampu mendorong perubahan positif dan menjadi potensi untuk membentuk arah negara.

Dengan mengenali jenis kemarahan orang muda, kita dapat terlebih dahulu mengakui kemarahan mereka, lalu mengarahkan emosi tersebut ke cara-cara yang lebih konstruktif. Temuan dari skala ini bisa menunjukkan seberapa besar peluang amarah dapat ditransformasikan menjadi partisipasi politik, aktivisme, atau solidaritas sosial.



Antikorupsi (71%), kemiskinan (67%), dan ekonomi (62%) menjadi tiga topik teratas yang paling memicu kemarahan orang muda.



(Anti)korupsi bukan hanya meningkat paling signifikan sebagai topik yang dianggap penting oleh orang muda, tetapi juga menjadi yang paling memicu kemarahan orang muda. Tingkat kemarahan ini terutama dirasakan oleh mereka yang berusia ≥31 tahun (77%) dibandingkan kelompok usia lainnya. Topik (anti)korupsi juga membuat (sangat) marah orang muda yang berada di Sumatera (71%), Jawa (73%), dan Sulawesi (76%).

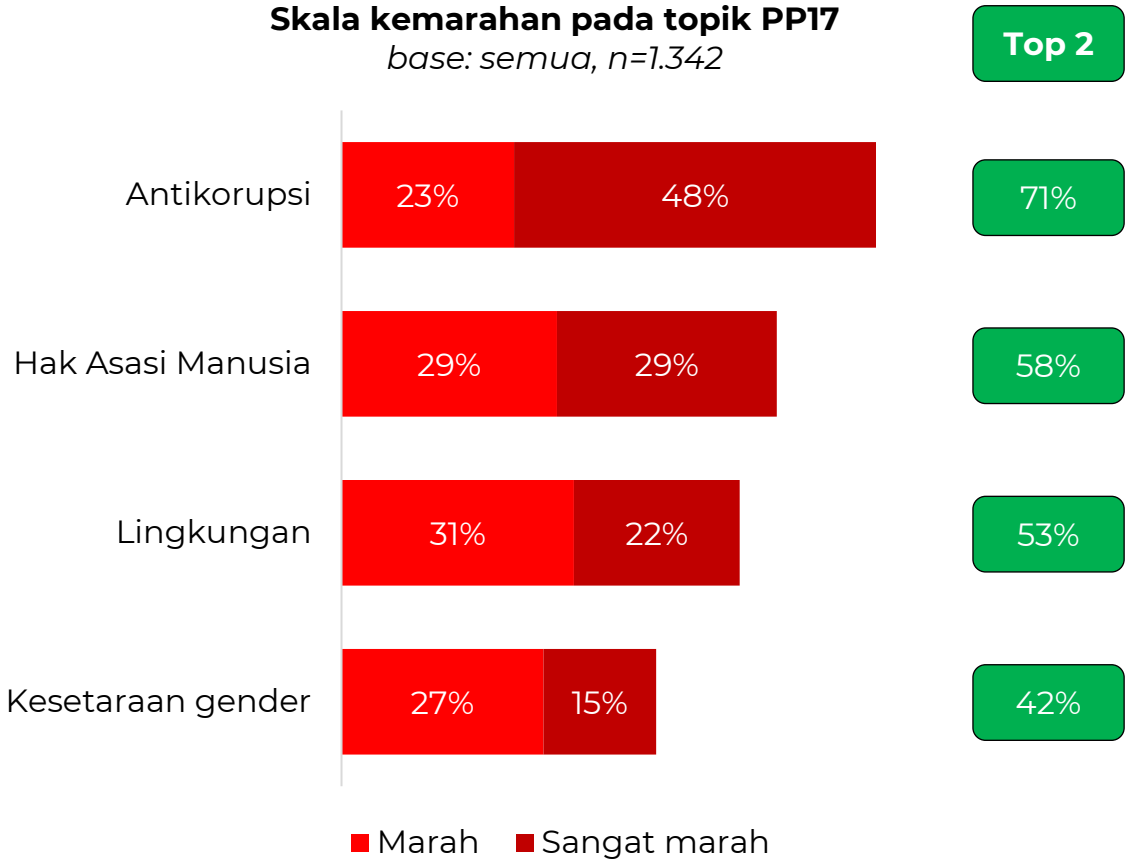
Orang muda berusia ≥31 tahun secara signifikan lebih banyak merasa agak marah dan (sangat) marah dibandingkan kelompok usia lain. Mereka signifikan merasa agak marah di topik HAM (24%), ketenagakerjaan (31%), dan (kesetaraan) gender (25%). Selain antikorupsi (77%), orang muda ≥31 tahun juga merasa (sangat) marah terhadap topik kemiskinan (73%) dan pendidikan (63%). Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa kelompok usia ≥31 tahun merasa paling terdampak secara negatif oleh perkembangan di berbagai topik di atas.

Lebih lanjut, tingkat kemarahan orang muda sejalan dengan pandangan politik dan minat mereka terhadap isu. Mereka yang merasa sangat berminat terhadap isu (75%), serta tergolong progresif (66%) dan sangat progresif (75%). Ini menunjukkan bahwa kemarahan orang muda tidak sekadar ekspresi emosional, melainkan terkait erat dengan kesadaran politik dan kepedulian mereka terhadap isu publik.

Q01a Seberapa marah Anda ketika mendengar topik-topik di bawah ini?

Seperti skala prioritas, antikorupsi (71%) juga menjadi topik yang paling memicu kemarahan orang muda. Di sisi lain, topik gender (42%) lagi-lagi belum menjadi perhatian orang muda.

Skala kemarahan pada topik PP17
base: semua, n=1.342



Orang muda berusia ≥31 tahun (77%), tinggal di Sumatera (71%), Jawa (73%), dan Sulawesi (76%) signifikan merasa (sangat) marah terhadap isu antikorupsi. Ini juga dirasakan oleh yang sangat tertarik dengan isu (81%), progresif dan sangat progresif (keduanya 77%).

Orang muda sangat marah terhadap isu HAM, terutama bagi karyawan swasta/PNS (61%), kelompok frontliner (67%), mereka progresif (62%) dan sangat progresif (66%), sangat tertarik pada isu ini (71%), merasa marah (74%) dan sangat marah (98%).

Orang muda sangat marah terhadap isu lingkungan , terutama bagi memiliki pendidikan dasar dan menengah (54%), karyawan swasta/PNS (59%), tergolong *frontliner* (64%), progresif (60%), sangat progresif (64%), merasa marah (66%), serta sangat marah (96%).

Orang muda (sangat) marah terhadap isu gender, terutama bagi karyawan swasta/PNS (46%), kelompok *frontliner* (55%), mereka sangat tertarik (53%), marah (45%) dan sangat marah (83%).

Q01a Seberapa marah Anda ketika mendengar topik-topik di bawah ini?

Isu Korupsi

Korupsi terjadi ketika individu/kelompok yang memiliki kekuasaan atau jabatan menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan dan kepentingan pribadi, bukan untuk membantu orang lain.

Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, dan semakin memperparah ketimpangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan krisis lingkungan (Transparency International Indonesia, 2024). Sebaliknya, antikorupsi diartikan sebagai bidang kebijakan dan praktik yang terus berkembang yang berupaya mengurangi kejadian dan dampak buruk korupsi dalam segala manifestasinya.

Selama 2020-2024, KPK telah menangani setidaknya 2.730 perkara tindakan pidana korupsi (Tipikor). Kinerja ini diikuti pengungkapan tindak pidana korupsi berskala besar selama paruh pertama 2025.

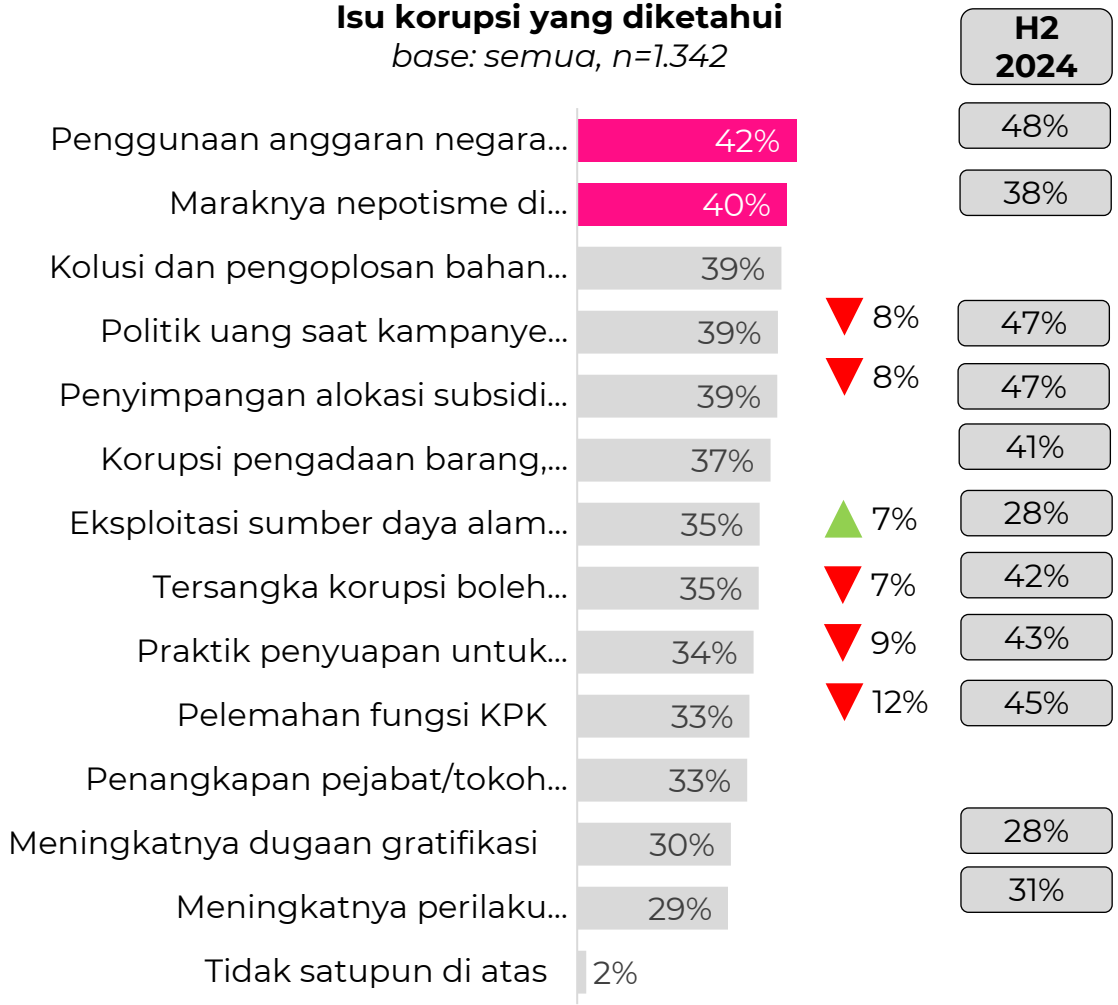
Mengawali 2025, beberapa skandal korupsi besar meruak ke publik. Misalkan, kasus tata kelola minyak mentah oleh Pertamina yang dilansari merugikan keuangan negara sertidaknya Rp 193,7 triliun. Selain itu, terdapat permasalahan korupsi yang lebih berfokus pada proses penanganan, seperti Kasus Tom Lembong, yang ramai diperbincangkan publik karena penanganan kasus dinilai sangat politis.

Beragam permasalahan korupsi yang ada menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia belum memiliki cara efektif untuk menyelesaikan korupsi. Hal ini didasari oleh penyelesaian korupsi yang lebih banyak difokuskan pada hilir permasalahan, yaitu langkah penanganan. Padahal, membangun mekanisme pencegahan korupsi di hilir masalah juga tidak kalah, kalau bukan lebih, penting. Misalkan, dengan pengesahan dan implementasi kebijakan antikorupsi yang berfokus pada pencegahan untuk menyelesaikan korupsi dari akarnya, seperti RUU Pengadaan Barang dan Jasa, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan RUU Perampasan Aset yang tengah masuk sebagai prioritas Dewan Parlemen Rakyat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama
https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/05/Industri-Keruk-Nikel-Korupsi-Struktural-dan-Dampak.pdf

Orang muda paling banyak mengetahui isu penggunaan anggaran negara yang tidak transparan (42%) dan praktik nepotisme di jabatan pemerintahan (40%).

Isu korupsi yang diketahui
base: semua, n=1.342

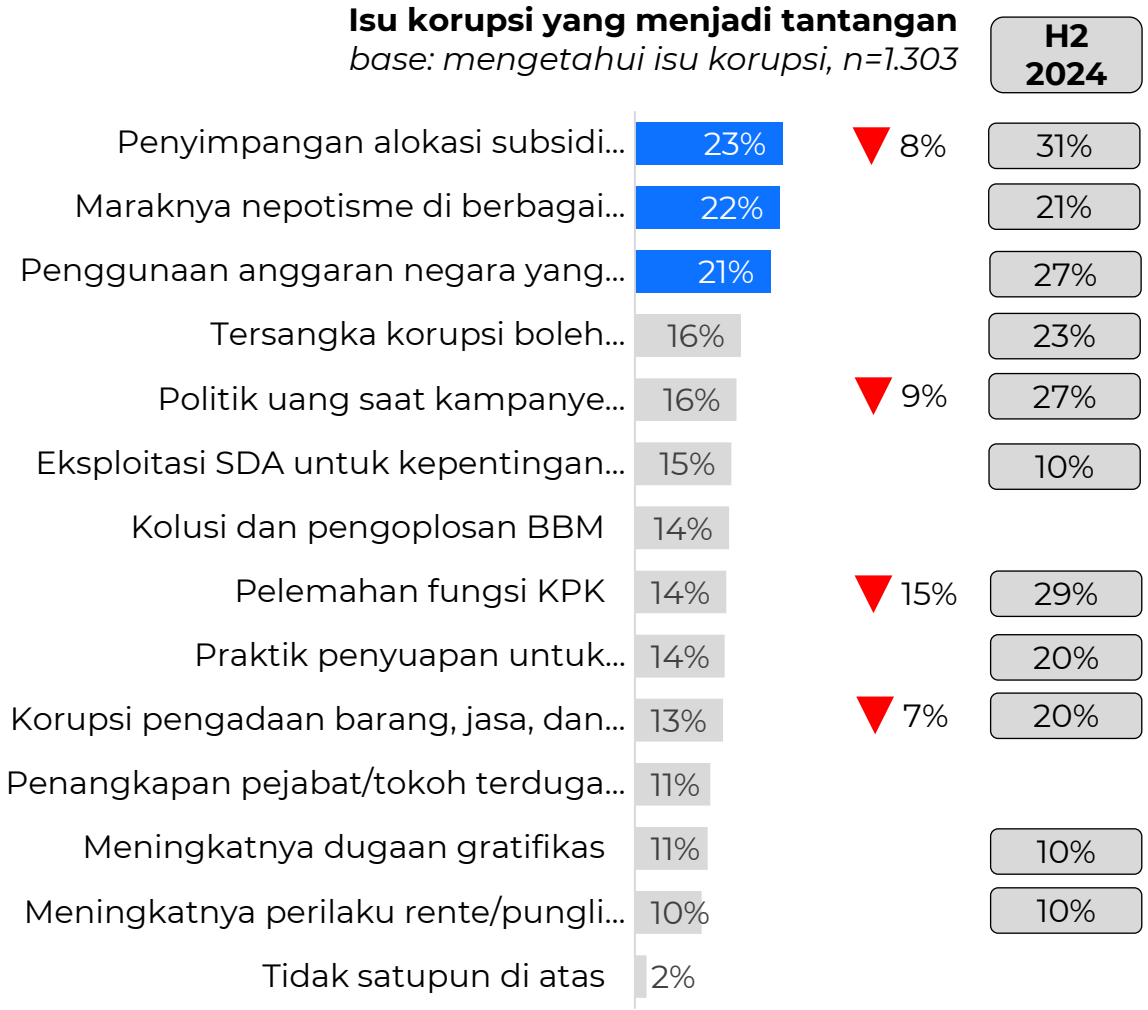


Penggunaan anggaran negara yang tidak transparan masih menjadi isu korupsi yang paling diketahui oleh orang muda sejak semester kedua 2024. Pada semester ini, pengetahuan mengenai penggunaan anggaran yang tidak transparan jauh lebih tinggi di Kalimantan (54%) dibandingkan wilayah lain, sementara terendah di Sumatera (35%). Pola serupa juga terlihat pada anak muda perkotaan (45%) yang secara signifikan lebih menyadari isu ini dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan.

Di sisi lain, nepotisme menempati posisi kedua sebagai isu korupsi yang paling dikenal, terutama di kalangan usia 21–25 tahun (45%), pelajar (47%), serta mereka yang tinggal di kota (42%). Kesadaran terhadap isu nepotisme bahkan meningkat seiring pandangan politik: dari yang cenderung progresif (32%), progresif (49%), hingga sangat progresif (59%). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin kritis pandangan politik orang muda, semakin besar pula perhatian mereka terhadap praktik-praktik korupsi yang mengakar dalam struktur pemerintahan.

$K06_mr Manakah dari isu korupsi berikut yang kamu ketahui, meskipun kamu hanya pernah mendengarnya?

Penyimpangan subsidi negara (23%), maraknya nepotisme (22%), dan tidak transparannya penggunaan anggaran negara (21%) paling disorot sebagai tantangan nasional saat ini.



Meski mengalami penurunan dibandingkan H2 2024 (-8%), penyimpangan alokasi subsidi negara (23%) tetap dipandang sebagai isu korupsi yang menjadi tantangan nasional.

Perhatian terhadap isu penyimpangan alokasi subsidi negara signifikan lebih tinggi di kalangan perempuan (27%) dan ibu rumah tangga (28%). Sebaliknya, isu ini secara signifikan lebih rendah di kalangan pelajar (17%) dan mereka yang berusia ≤20 tahun (15%). Berdasarkan wilayah, orang muda yang tinggal di Nusa Tenggara (12%) juga secara signifikan menilai isu ini lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya.

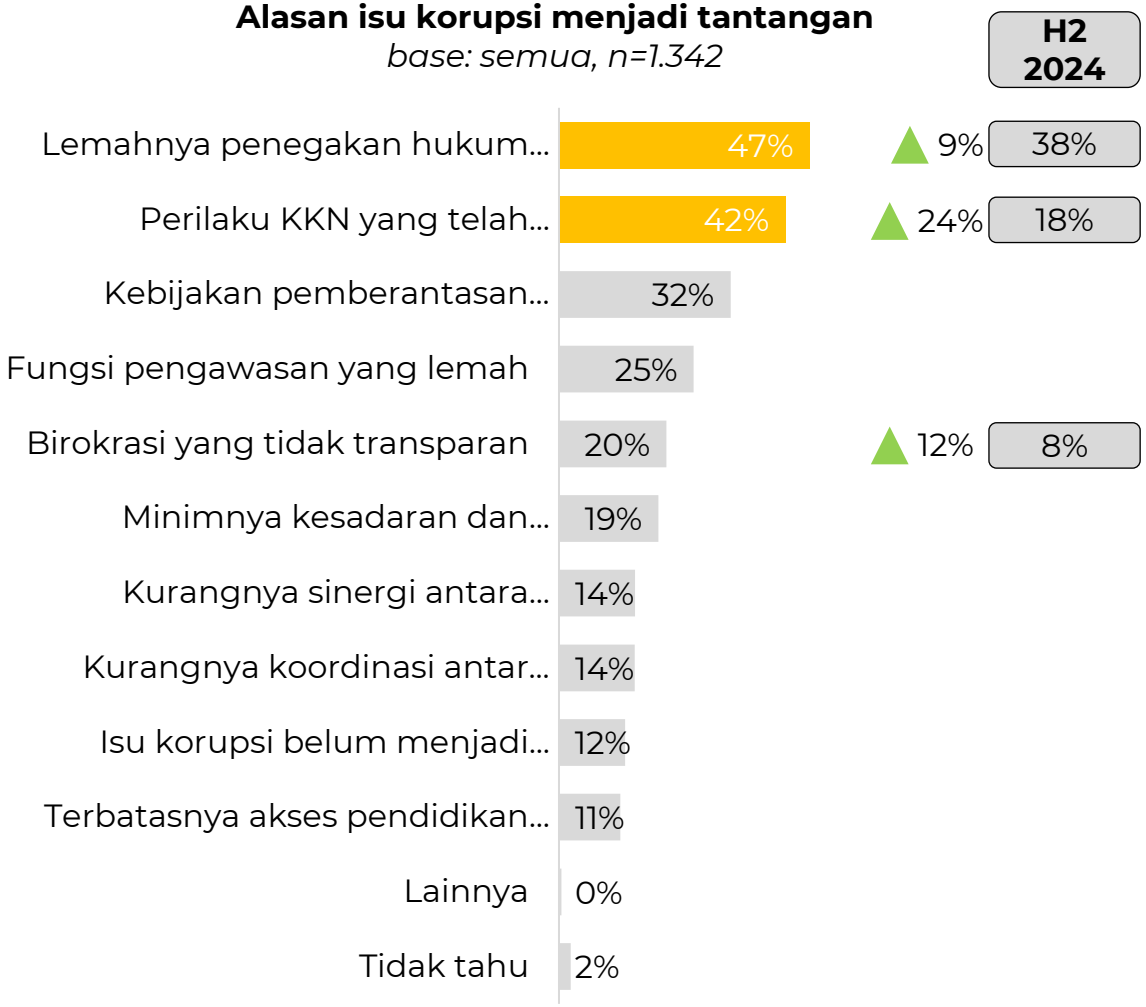
Sebaliknya, isu nepotisme justru lebih menonjol di mata pelajar (29%) yang menganggapnya sebagai tantangan nasional. Namun, isu ini signifikan lebih rendah dari kelompok usia 26–30 tahun (20%) dan mereka yang tinggal di Nusa Tenggara (15%).

Sementara itu, isu penggunaan anggaran negara yang tidak transparan lebih banyak dinilai sebagai tantangan nasional oleh kelompok progresif (26%) dan sangat progresif (25%).

$K07_mr Menurut kamu, isu korupsi manakah yang saat ini menjadi tantangan di seluruh Indonesia (skala nasional)?

Korupsi masih menjadi tantangan nasional karena faktor sistemik, seperti lemahnya penegakan hukum (47%) dan perilaku KKN yang telah mengakar (42%).

Alasan isu korupsi menjadi tantangan
base: semua, n=1.342



Lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi koruptor (47%) masih menjadi alasan utama mengapa korupsi dianggap sebagai tantangan nasional. Alasan ini bahkan meningkat +9% dibandingkan periode sebelumnya, menegaskan bahwa orang muda masih menganggap penanganan hukum terhadap korupsi di Indonesia belum efektif.

Di saat yang sama, perilaku korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) juga melonjak (+22%) sebagai salah satu alasan utama bagi orang muda (42%). Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa, selama enam bulan pertama 2025, sorotan publik terhadap maraknya praktik KKN meningkat tajam.

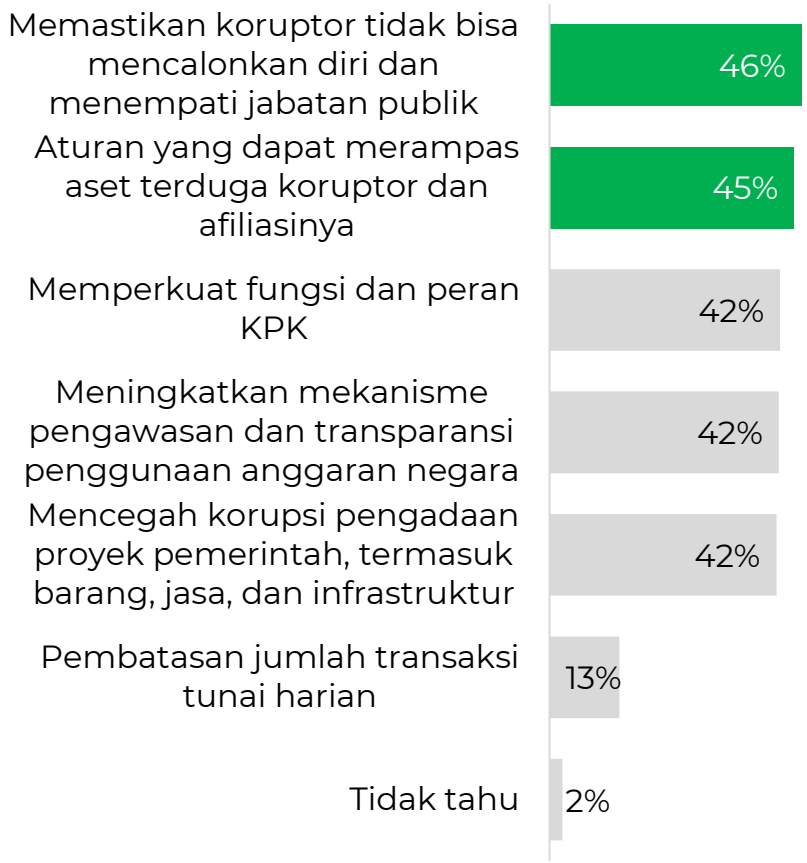
Secara demografis, lemahnya penegakan hukum dan sanksi lebih banyak disebut oleh ibu rumah tangga (55%) dan orang muda di perkotaan (49%). Sedangkan, perilaku KKN terutama dianggap sebagai alasan utama oleh mereka yang berpandangan progresif (53%) dan sangat progresif (55%). Konsistensi pola ini juga terlihat pada alasan lemahnya penegakan hukum: kelompok progresif (57%) dan sangat progresif (62%) secara signifikan lebih tinggi menilai isu ini sebagai akar tantangan korupsi nasional

$K08_mr Menurut kamu, mengapa isu-isu korupsi tersebut masih menjadi tantangan di Indonesia?

Orang muda paling menginginkan kebijakan yang dapat memastikan koruptor tidak bisa mencalonkan diri dan menempati jabatan publik lagi (46%), serta aturan yang dapat merampas aset terduga koruptor (45%).

Kebijakan antikorupsi yang perlu segera dilaksanakan pemerintah

base: semua, n=1.342



Nice to know

Dalam **Prolegnas 2025**, setidaknya terdapat dua (2) RUU yang berfokus pada pemberantasan korupsi:

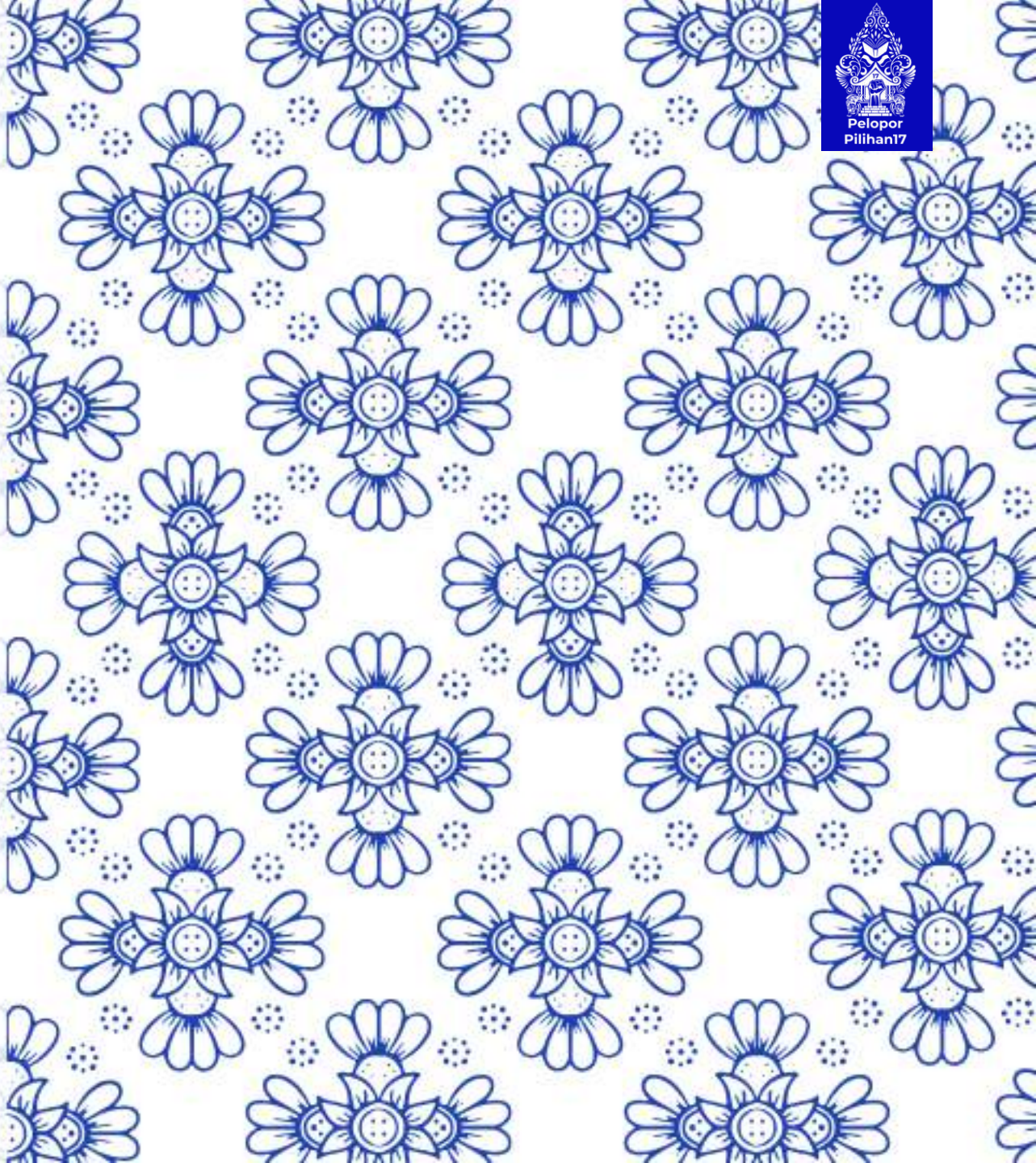
1. RUU Pengadaan Barang dan Jasa. RUU ini mengatur seluruh proses pengadaan untuk menjamin proses pengadaan yang lebih akuntabel dan bebas korupsi. Hal ini disebabkan karena proses pengadaan barang dan jasa saat ini masih memiliki celah korupsi yang besar, sekalipun menerapkan e-katalog.

2. RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. RUU ini akan membatasi nilai transaksi tunai sebesar Rp 100 juta, selebihnya harus melalui sistem keuangan. Ini ditujukan untuk mendeteksi potensi korupsi dengan mengulur waktu transaksi korupsi sehingga dapat terdeteksi oleh pihak berwenang.

Selain kedua RUU ini, ada pula **RUU Perampasan Aset** yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah. Melalui RUU Perampasan Aset, kerugian negara dari hasil tindak pidana dapat dirampas tanpa harus melalui proses pengadilan.

$K09_mr Menurutmu, apa kebijakan terkait (anti)korupsi yang perlu segera dilaksanakan pemerintah?

Isu Hak Asasi Manusia



Hak asasi manusia memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil, setara, dan dihormati.

Hak asasi manusia (HAM) ada pada setiap manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi dan universal. Prinsip ini menjadikan HAM aspek penting dalam keberlangsungan hidup setiap orang dan harus dijaga kualitasnya.

Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut tercermin dalam sila kedua Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” yang menekankan penghormatan terhadap HAM serta perlakuan adil antar sesama. Landasan konstitusionalnya juga tertuang dalam Bab XA UUD 1945, Pasal 28A-28J, yang menjamin hak hidup seluruh warga negara hingga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi penegakan HAM masih menghadapi tantangan serius. Indeks HAM Indonesia yang dirilis SETARA Institute pada 2024 berada di angka 3,1 (skala 1–7), menurun dari tahun sebelumnya. Skor rata-rata nasional untuk hak sipil dan politik hanya berada di angka 2,9, sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya mencapai 3,3. Kedua skor tersebut mengalami stagnansi, bahkan regresi, apabila dibandingkan periode sebelumnya.

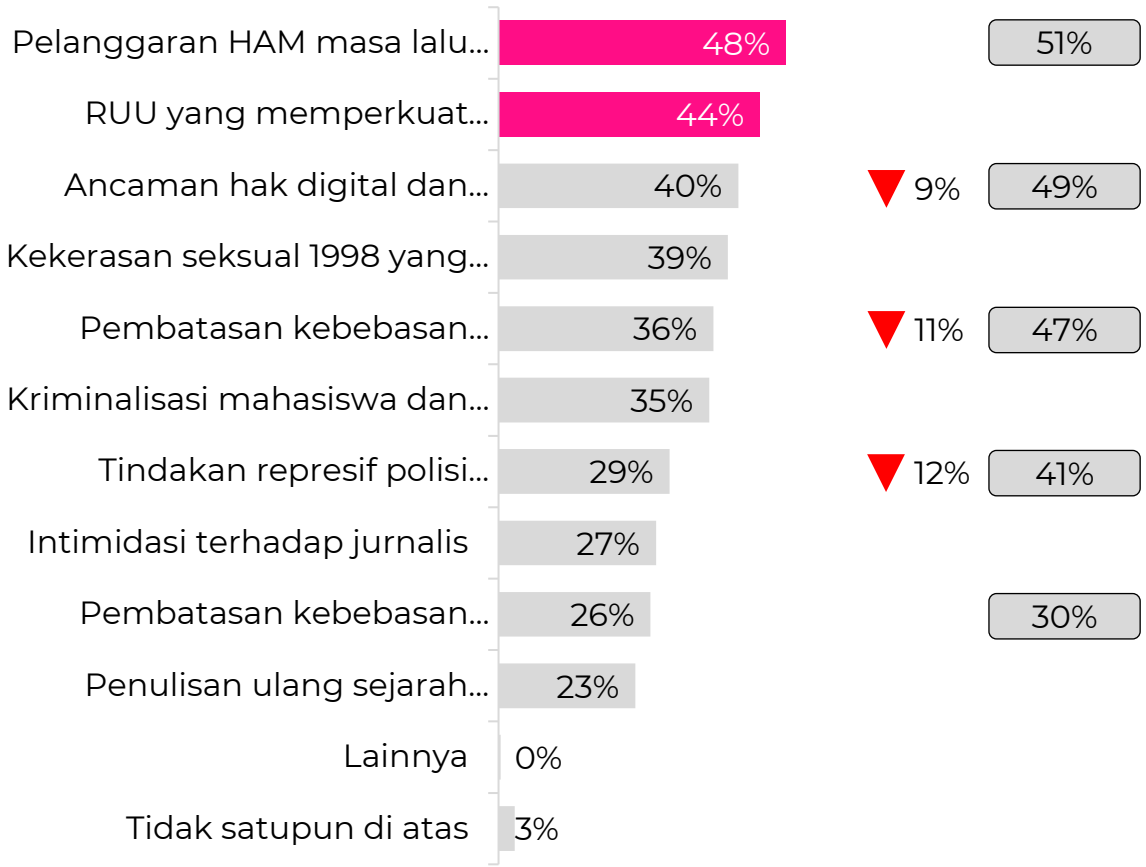
Respons pemerintah sendiri tampak ambivalen. Di satu sisi, Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh (1 Mei 2025) berencana mengukuhkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Upaya ini dilansir merupakan langkah rekognisi penting atas sejarah perjuangan buruh. Namun di sisi lain, terdapat indikasi penghilangan ingatan kolektif, terutama terkait tragedi 1998, melalui proses penulisan ulang sejarah. Kontradiksi ini semakin nyata ketika pidato kenegaraan presiden pada 15 Agustus 2025 di DPR-MPR sama sekali tidak menyinggung penegakan HAM maupun kebebasan berpendapat.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa wacana HAM di Indonesia masih terjebak antara simbolisme politik dan kebutuhan nyata akan keadilan. Tanpa langkah serius dan konsisten, pengakuan simbolis berisiko menjadi substitusi dari kewajiban negara untuk memastikan perlindungan HAM secara nyata.

https://www.tempo.co/politik/setara-institute-indeks-ham-indonesia-tahun-ini-turun-1179604
https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/

Pelanggaran HAM masa lalu (48%) masih menjadi isu HAM yang paling banyak diketahui orang muda, diikuti RUU yang dinilai memperkuat aparat (44%).

Isu kebebasan sipil dan hak politik yang diketahui
base: semua, n=1.342



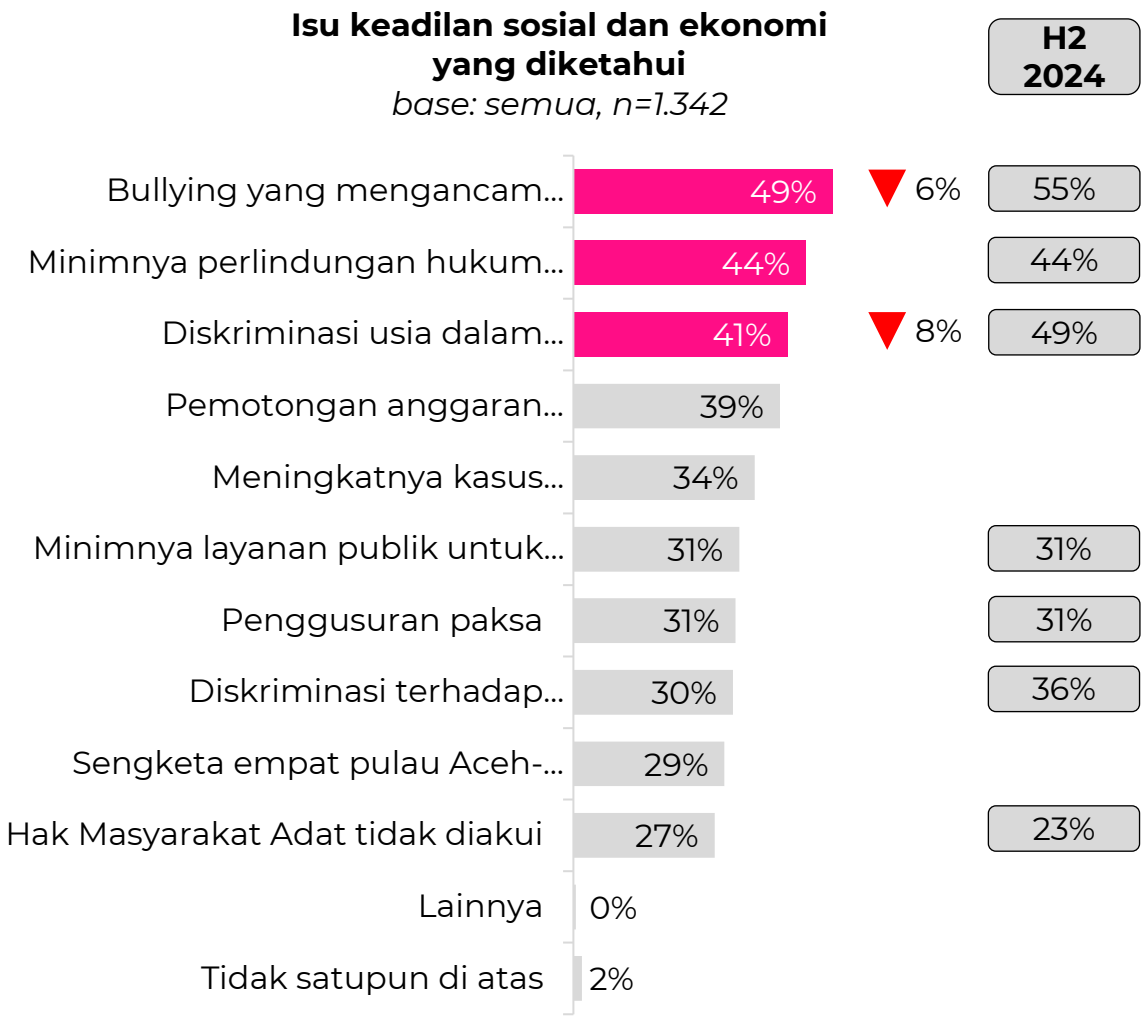
Pelanggaran HAM masa lalu (48%) masih menjadi isu HAM terkait kebebasan sipil dan hak politik yang paling banyak diketahui orang muda, sama seperti semester sebelumnya. Namun, pengetahuan ini tidak merata di semua kelompok. Orang muda berusia 26–30 tahun (44%) justru signifikan lebih rendah tingkat pengetahuannya terkait isu tersebut, sama halnya dengan isu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memperkuat kewenangan aparat (41%) dan ancaman hak digital (37%).

Perbedaan pandangan politik juga membentuk variasi pengetahuan orang muda. Mereka yang tergolong (sangat) progresif mengetahui lebih banyak isu kebebasan sipil dan hak politik dibandingkan orang muda yang tergolong konservatif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keterpaparan isu HAM dipengaruhi oleh pandangan politik yang membentuk tingkat kesadaran orang muda.

Selama semester pertama 2025, RUU-RUU yang memperkuat kewenangan aparat sendiri menjadi sorotan publik. UU TNI yang baru disahkan, RUU Polri, hingga RKUHAP* ramai dibahas di media sosial dan memicu gelombang protes di berbagai kota. Tingginya paparan ini tercermin dalam temuan NBS, dimana isu tersebut menempati posisi kedua (44%), meskipun baru pertama kali masuk dalam NBS semester ini.

$H06a_mr Manakah dari isu terkait kebebasan sipil dan hak politik berikut yang kamu ketahui, meskipun kamu hanya pernah mendengarnya?
**Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Bullying (55%), minimnya perlindungan hukum bagi buruh/pekerja (44%), dan diskriminasi usia dalam pekerjaan (41%) paling disorot orang muda.



Bullying atau perundungan (49%) masih menjadi isu sosial-ekonomi utama yang paling banyak diketahui publik, meskipun mengalami penurunan -6% dibandingkan H2 2024. Isu ini lebih banyak disadari perempuan (54%) dibandingkan laki-laki (45%), serta mereka yang memiliki pandangan politik progresif (55%) dan sangat progresif (62%).

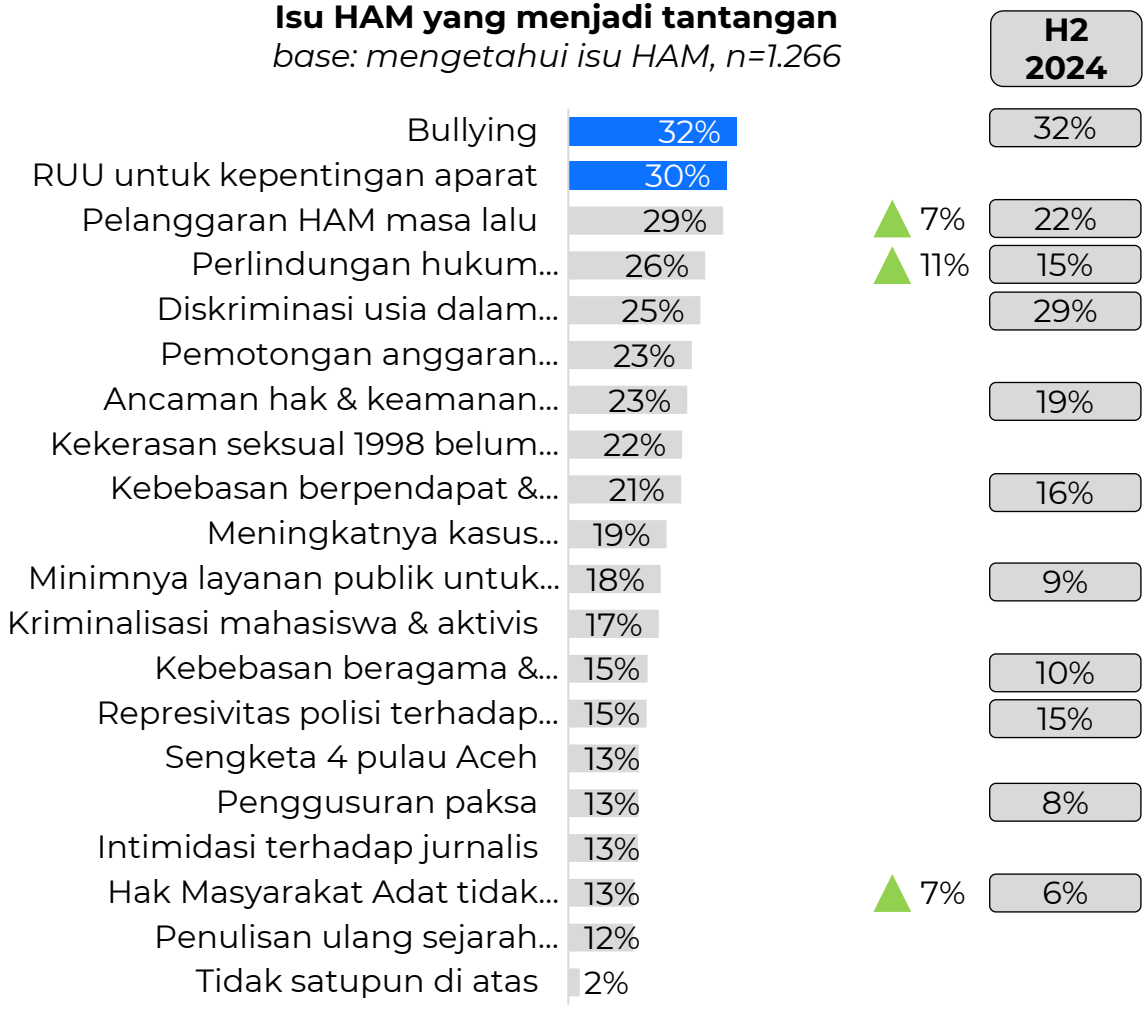
Minimnya perlindungan hukum bagi buruh/pekerja (44%) tetap menempati posisi penting tanpa perubahan dari periode sebelumnya, dengan tingkat pengetahuan lebih tinggi di Jawa (47%) dibandingkan wilayah lain.

Sementara itu, meningkatnya kasus perdagangan orang (34%) langsung mencuat meski merupakan isu baru dalam NBS semester ini. Lonjakan perhatian publik terkait tingkat pidana perdagangan orang sendiri terjadi sejak awal 2025, terutama setelah terungkapnya beberapa kasus besar, termasuk pemulangan 554 WNI korban perdagangan orang di Myanmar.

$H06b_mr Manakah dari isu keadilan sosial dan ekonomi berikut yang kamu ketahui, meskipun kamu hanya pernah mendengarnya?
https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar

Bullying (32%) masih menjadi isu HAM yang dianggap paling menjadi tantangan bagi orang muda sejak semester lalu.

Isu HAM yang menjadi tantangan
base: mengetahui isu HAM, n=1.266



Bullying menjadi tantangan terutama bagi perempuan (36%), ibu rumah tangga (41%), mereka yang tinggal di Jawa (34%), perkotaan (34%), frontliner (42%), sangat tertarik dengan isu (41%), sangat progresif (45%), progresif (36%), serta bagi mereka yang sangat marah (42%).

Pelanggaran HAM di masa lalu dianggap tantangan, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan (32%), *frontliner* (39%), merasa tertarik (30%) dan sangat tertarik (43%) dengan isu, serta progresif (45%) dan sangat progresif (32%)

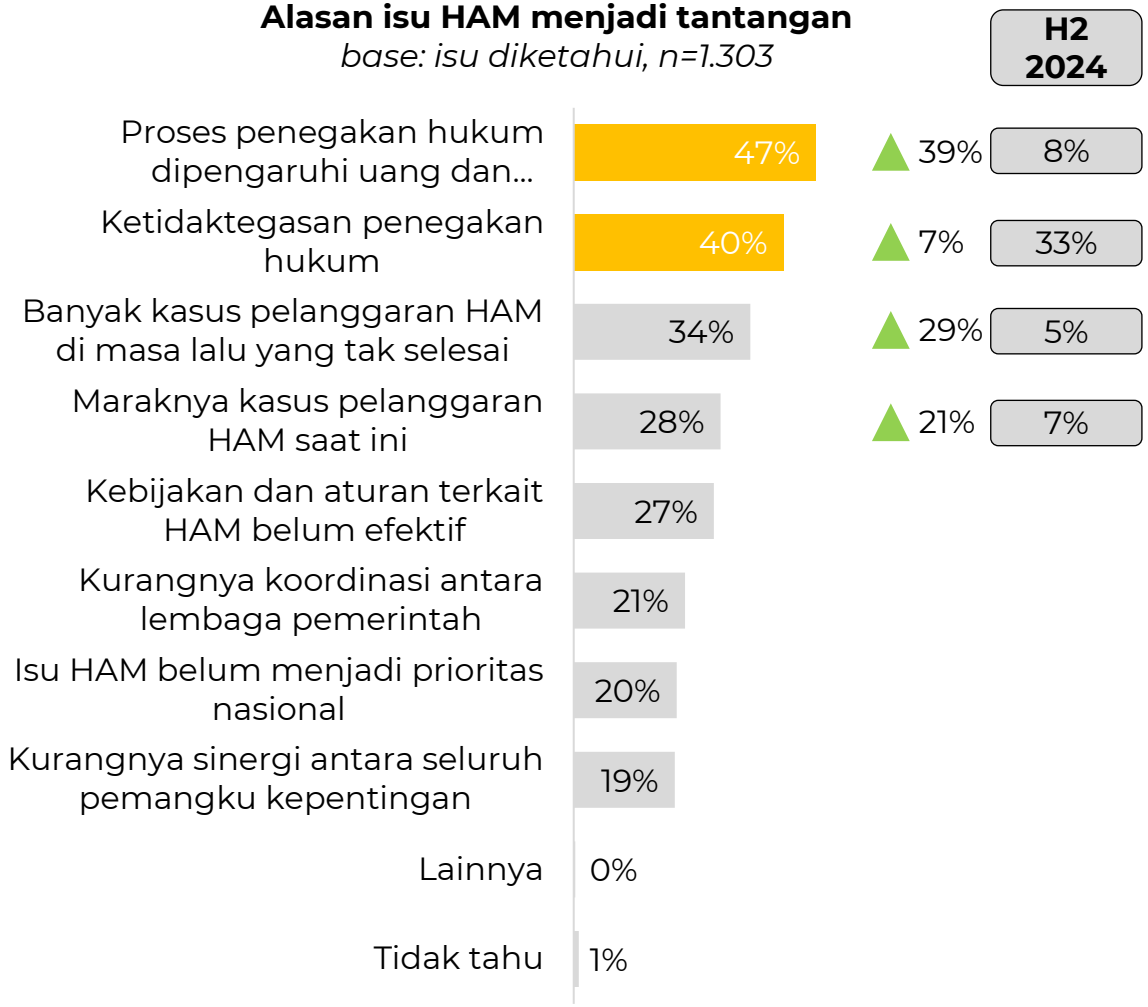
RUU yang memperkuat aparat terutama dianggap tantangan bagi pelajar (40%), karyawan swasta/PNS (35%), mereka yang tinggal di perkotaan (32%), *activist* (35%), *frontliner* (39%), mereka yang sangat tertarik (42%), serta merasa marah (30%) dan sangat marah (40%).

Minimnya perlindungan buruh dianggap tantangan bagi perempuan (29%), umur 21-25 (32%), pelajar (33%), mereka yang tertarik (28%), sangat tertarik (35%), sangat progresif (38%), progresif (33%), serta mereka yang sangat marah (35%)

$H07_mr Menurut kamu, isu HAM manakah yang saat ini menjadi tantangan di seluruh Indonesia (skala nasional)?

Proses penegakan hukum yang korup (47%) dan ketidaktegasan aparat penegak hukum (40%) disorot sebagai alasan isu HAM masih menjadi tantangan saat ini.

Alasan isu HAM menjadi tantangan
base: isu diketahui, n=1.303



Proses penegakan hukum yang dipengaruhi uang dan kekuasaan (47%) kini menjadi alasan utama mengapa isu-isu HAM masih menjadi tantangan di Indonesia. Faktor ini menonjol terutama di kalangan perempuan (49%) serta mereka yang merasa marah (50%) dan sangat marah (56%) ketika mendengar isu HAM. Peningkatan yang signifikan (+33%) dibandingkan H2 2024 mengindikasikan meningkatnya kesadaran orang muda terhadap maraknya kasus penyalahgunaan wewenang di institusi penegak hukum.

Ketidaktegasan aparat dalam penegakan hukum (40%) juga konsisten menjadi sorotan, meningkat +7% dari semester lalu (33%). Perempuan (44%) dan kelompok muda yang tergolong *frontliner* (50%) tercatat memiliki tingkat perhatian tertinggi terhadap isu ini.

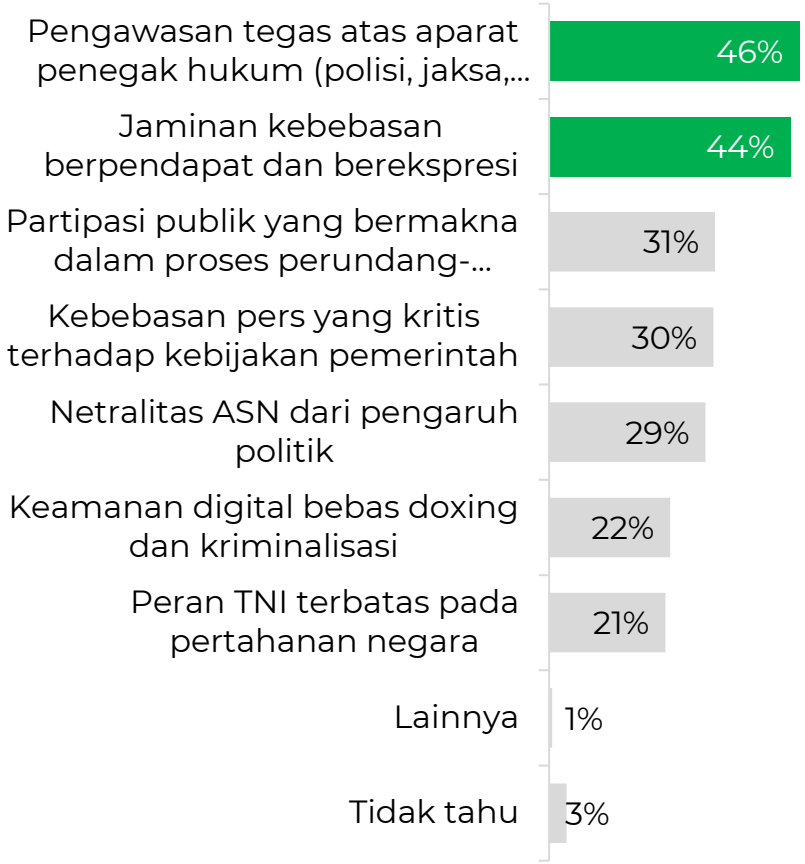
Sementara itu, peningkatan signifikan perhatian terhadap pelanggaran HAM masa lalu (+29%) dan maraknya kasus HAM saat ini (+21%) tak lepas dari sorotan publik terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan mengenai kekerasan seksual massal 1998 pada Juni 2025, serta sejumlah aksi demonstrasi yang berujung pada pelanggaran HAM.

$H08_mr Menurut kamu, mengapa isu-isu HAM tersebut masih menjadi tantangan di Indonesia?

Pengawasan atas aparat penegak hukum (46%) dan jaminan kebebasan berpendapat (44%) menjadi aspirasi kebijakan paling utama oleh orang muda.

Kebijakan HAM yang perlu segera dilaksanakan pemerintah

base: semua, n=1342



Pengawasan yang tegas atas aparat penegak hukum menjadi aspirasi utama kebijakan HAM yang disuarakan orang muda (48%), terutama mereka yang tinggal di Jawa (50%). Sorotan ini sejalan dengan alasan mengapa isu HAM masih menjadi tantangan: penegakan hukum dipandang masih korup dan aparat dinilai tidak tegas, sementara pemerintah justru memperkuat kewenangan aparat tanpa disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Kekhawatiran tersebut juga tercermin dalam aspirasi kedua terbesar, yaitu jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (44%). Aspirasi ini terutama disuarakan oleh orang muda yang sangat progresif (58%).

Nice to know

Dalam **Prolegnas 2025**, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (KUHAP) akan direvisi dengan mengubah dan menambah beberapa kewenangan dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Sejauh ini, masih terdapat berbagai permasalahan di dalam RKUHAP seperti terkait minimnya pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam proses penyidikan hingga persidangan. Selain itu, terdapat permasalahan standarisasi mengenai pemahaman mengenai penangkapan, pembuktian, peran advokat, serta konsep *restorative justice*.

$H09_mr Menurut kamu, apa kebijakan terkait HAM yang perlu segera dilaksanakan pemerintah?

Isu Gender

Pelopor Pilihan17

Gender mengacu pada karakteristik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Sebagai konstruksi sosial, gender bervariasi dari satu orang dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender, perempuan, laki-laki, dan beragam ekspresi gender lainnya harus mendapatkan perlakuan yang setara dan adil. Di konteks global, kesetaraan gender dijamin melalui Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang menjamin perlindungan bagi hak-hak perempuan. Konvensi ini diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 1984 sehingga pengakuan atas hak-hak perempuan memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam kebijakan kontemporer, Permen PPPA No. 6 Tahun 2023 mengenai Parameter Keseteraan Gender yang mengatur kesetaraan gender dan jaminan hak-hak perempuan dengan lebih mendalam. Secara kelembagaan, Indonesia memiliki Komnas Perempuan yang berfokus pada penghapusan kekesaran terhadap perempuan dan pemenuhan hak perempuan.

Meski demikian, masih terdapat tantangan serius. Beberapa produk hukum dinilai tidak inklusif, seperti UU Pornografi, yang kerap memperkuat stigma dan diskriminasi. Sementara itu, tuntutan publik semakin menguat agar kebijakan baru, seperti aturan cuti ayah, segera dihadirkan sebagai langkah reformasi peran gender di keluarga dan upaya mempersempit kesenjangan gender di ruang domestik maupun publik.

Indeks Ketimpangan Gender 2024 yang dirilis BPS pada awal 2025 menunjukkan tren peningkatan konsisten dalam situasi kesetaraan gender di Indonesia. Indeks ini mengukur tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja, dan menunjukkan perbaikan di hampir seluruh aspek, kecuali kesehatan reproduksi yang justru menurun dibandingkan 2023. Kondisi ini sejalan dengan temuan Gender Gap Dashboard (2025) dan World Economic Forum (2024) yang menyoroti hambatan perempuan dalam mengakses informasi maupun layanan kesehatan, memperlihatkan bahwa kesenjangan masih nyata dalam praktik sehari-hari.

Situasi ini menegaskan bahwa komitmen terhadap kesetaraan gender tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga menuntut keberanian politik, reformasi kebijakan yang lebih inklusif, serta perubahan budaya yang berkelanjutan agar perempuan dan kelompok rentan benar-benar dapat menikmati haknya secara setara.

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2430/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-konsisten-mengalami-penurunan-menjadi-0-421--menunjukkan-perbaikan-dalam-kesetaraan-gender-.html

Skala Pemahaman Isu Gender

Nice to know

Total skor dihitung hingga maksimum 100, dengan skor lebih tinggi mencerminkan pemahaman lebih baik.

Kelompok "Tidak Memahami" berarti tidak memiliki pengetahuan tentang isu gender, sedangkan "Memahami Secara Mendalam" memiliki wawasan luas terkait kesetaraan gender hingga memahami dampak dan implikasinya.

Memahami Secara Mendalam	Kelompok ini memiliki pemahaman yang komprehensif tentang isu gender. Mereka tidak hanya mengenali contoh kesetaraan gender, tetapi juga memahami dampaknya terhadap orang muda, kondisi sosial-politik, dan lain-lain.
Memahami Secara Cukup	Kelompok ini memiliki pemahaman mengenai gender yang cukup baik. Mereka dapat mengenali berbagai bentuk ketidaksetaraan gender dan memahami dampaknya terhadap orang muda, namun belum mampu menganalisis lebih mendalam.
Memahami Secara Terbatas	Kelompok ini memiliki pemahaman dasar terkait gender, tetapi hanya pada aspek yang paling umum atau sederhana, tanpa mampu mengenali situasi yang lebih kompleks.
Tidak Memahami	Kelompok ini tidak memiliki pengetahuan atau kesadaran sama sekali tentang isu gender. Mereka kesulitan mengenali contoh-contoh isu (kesetaraan) gender dalam kehidupan sehari-hari.

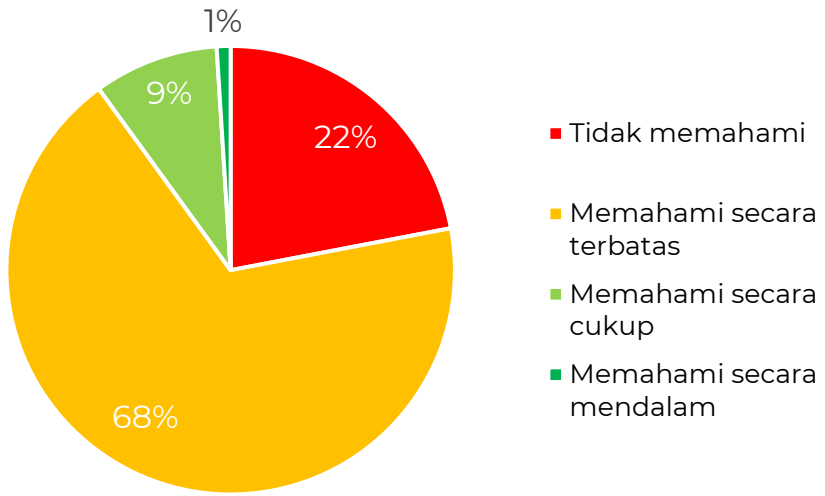
Meski cukup terpapar dengan isu-isu gender, orang muda masih belum memahami isu kesetaraan gender.

Pemahaman orang muda terkait isu gender
base: semua, n=1.342

	Termasuk	Tidak termasuk	Tidak tahu
Memperbolehkan perempuan bekerja selama tetap mengutamakan kewajibannya di rumah	80%	15%	5%
Keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan, terutama di posisi strategis dan sebagai pembuat keputusan.	84%	11%	5%
Cuti ayah supaya ayah bisa fokus untuk mengurus anaknya.	63%	32%	6%
Menyediakan WC bebas gender untuk para transgender.	28%	63%	9%
Dibandingkan laki-laki, perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan setinggi mungkin.	37%	59%	4%
Seperti laki-laki, perempuan harus bisa mengangkat galon air dan benda-benda berat lainnya.	40%	54%	5%

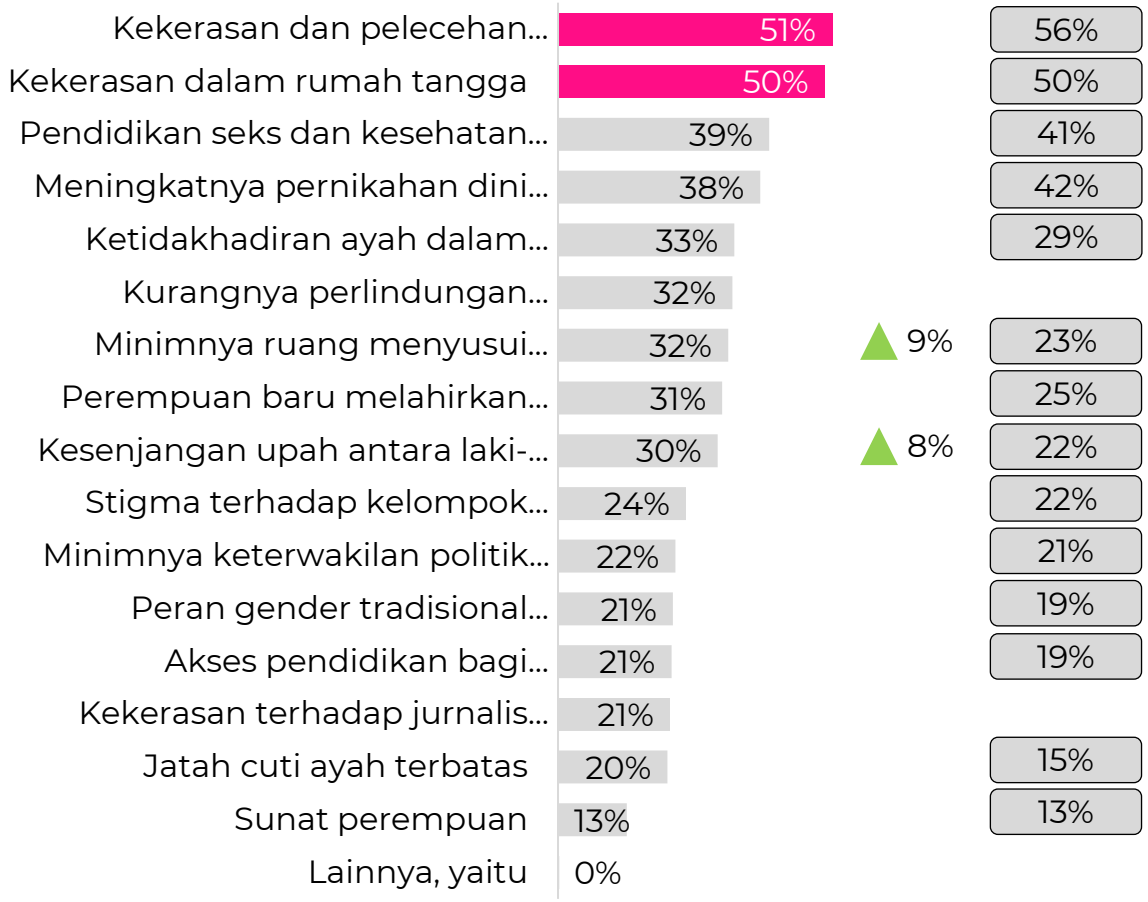
Pemahaman orang muda terkait isu gender saat ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang isu gender bersifat kompleks dan tidak seragam. Ada kemajuan dalam mendukung kesetaraan di beberapa area seperti politik dan pengasuhan anak, namun pandangan tradisional mengenai peran domestik, stereotip fisik, dan kurangnya pemahaman terhadap isu gender secara mendalam masih menjadi tantangan.

Tingkat pemahaman isu gender
base: semua, n=1.342



Kekerasan dan pelecehan seksual (51%) dan KDRT (50%) masih menjadi isu gender yang paling diketahui orang muda.

Isu gender yang diketahui
base: semua, n=1.342



	H2 2024
	56%
	50%
	41%
	42%
	29%
▲ 9%	23%
	25%
▲ 8%	22%
	22%
	21%
	19%
	19%
	15%
	13%

Sebagian besar orang muda cenderung memaknai isu gender terutama sebagai persoalan kekerasan, seperti kekerasan dan pelecehan seksual (51%) serta kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (50%). Ini dapat menunjukkan bahwa pemahaman orang muda terkait gender masih terbatas pada aspek kekerasan, sementara dimensi kesetaraan gender yang lebih luas, misalkan terkait hak ekonomi, politik, maupun peran sosial, belum banyak dipahami.

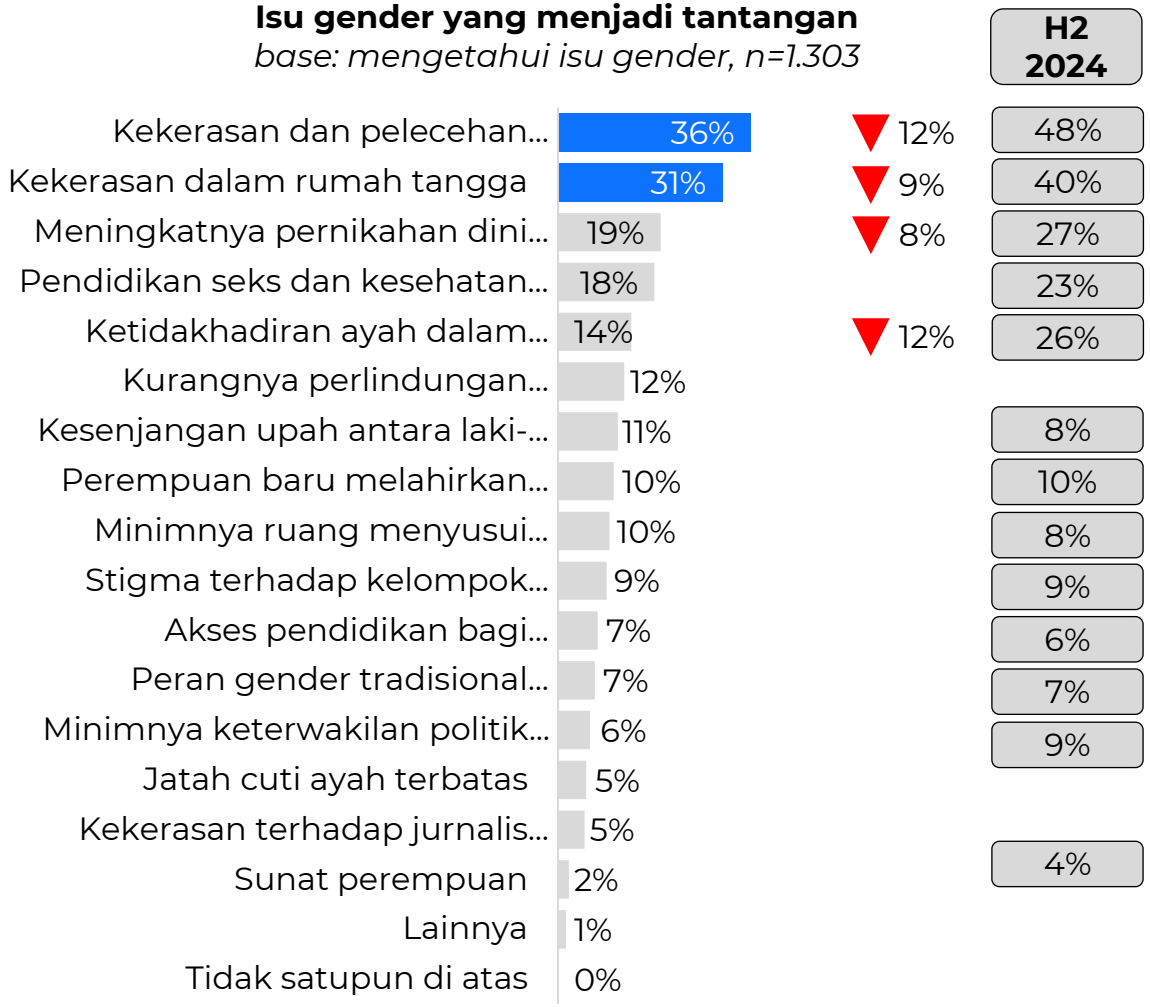
Isu kekerasan dan pelecehan seksual lebih signifikan diketahui oleh perempuan (55%), ibu rumah tangga (61%), mereka yang tertarik (52%), sangat tertarik (65%), sangat progresif (66%), dan progresif (61%)

Isu ini lebih signifikan diketahui oleh perempuan (55%), ibu rumah tangga (58%), mereka yang tertarik (51%), sangat tertarik (65%), sangat progresif (64%), dan progresif (58%), mereka juga sangat marah (60%) terhadap isu ini

$G06_mr Manakah dari isu gender berikut yang kamu ketahui, meskipun hanya pernah mendengarnya?

Seperti tingkat kesadaran, kasus kekerasan dan pelecehan seksual (36%) dan KDRT (31%) juga menjadi dua isu gender yang dianggap sebagai tantangan nasional.

Isu gender yang menjadi tantangan
base: mengetahui isu gender, n=1.303



Kekerasan dan pelecehan seksual dianggap tantangan oleh perempuan (40%), ibu rumah tangga (46%), mereka yang tinggal di Jawa (39%), Sulawesi (41%), dan bagi mereka yang sangat progresif (48%), progresif (43%), merasa marah (38%) dan sangat marah (42%), serta mereka yang sangat tertarik (42%).

Isu minimnya ruang menyusui (laktasi) di tempat kerja dan ruang public dianggap tantangan oleh laki-laki (11%), fresh graduates (13%), karyawan swasta/PNS (12%), serta mereka yang cukup konservatif (16%),

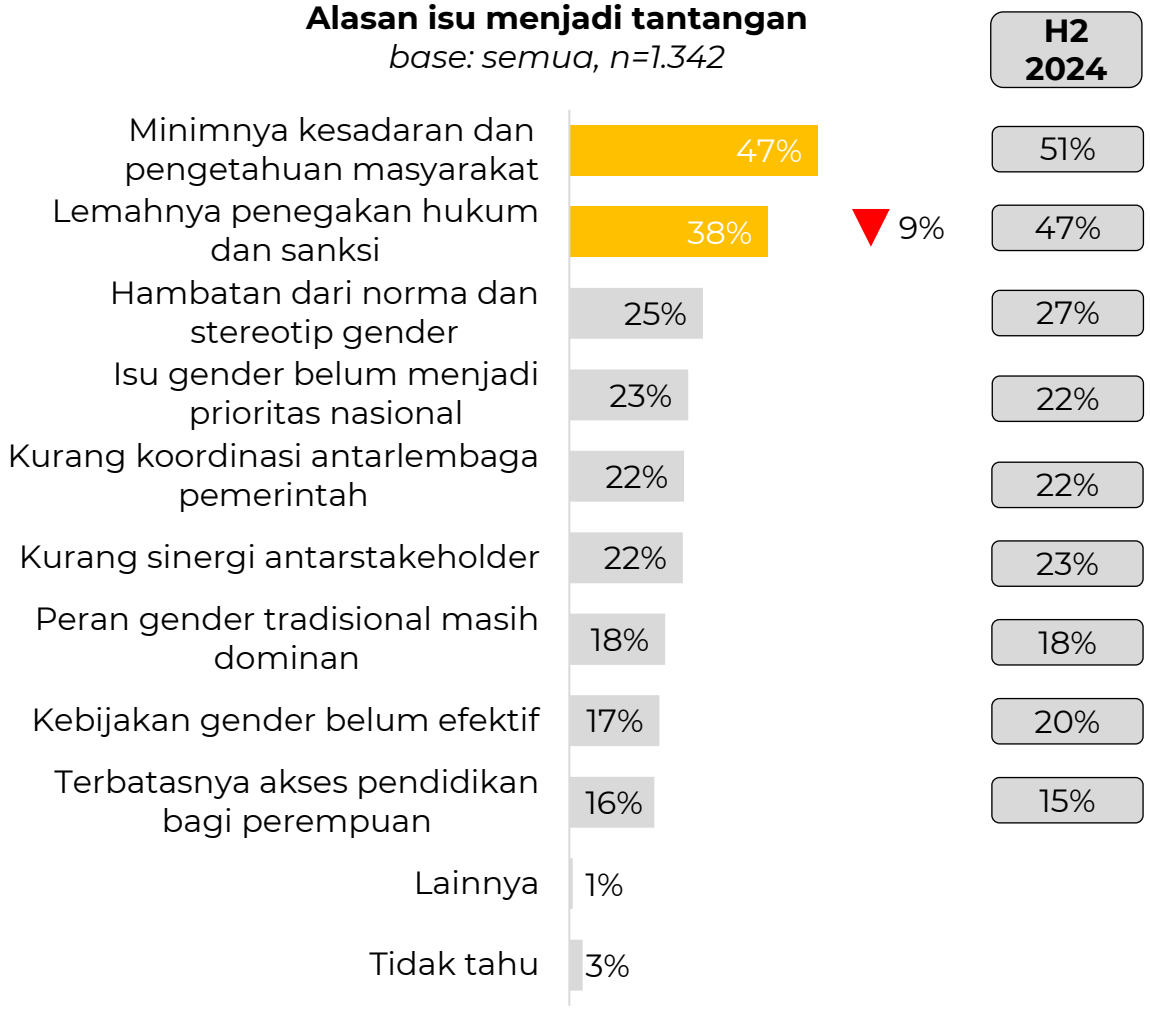
Isu ini dianggap tantangan oleh perempuan (40%), ibu rumah tangga (46%), mereka yang tinggal di Jawa (39%), Sulawesi (41%), dan bagi mereka yang sangat progresif (48%), progresif (43%), marah dengan isu ini (38%), sangat marah (42%), serta mereka yang sangat tertarik (42%).

Isu ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan anak dianggap tantangan, terutama bagi perempuan (18%), mereka yang memiliki pendidikan tinggi (19%), ibu rumah tangga (20%),serta mereka yang progresif (17%)

$G07_mr Menurut kamu, isu gender manakah yang saat ini menjadi tantangan di seluruh Indonesia (skala nasional)?

Minimnya kesadaran masyarakat (47%) menjadi alasan utama isu gender masih menjadi tantangan nasional.

Alasan isu menjadi tantangan
base: semua, n=1.342



Tidak ada pergeseran posisi dari semester lalu terkait alasan isu gender masih menjadi tantangan Indonesia. Seperti semester lalu, sebagian orang muda masih melihat persoalan gender terutama sebagai masalah individu (47%), sementara dimensi struktural dan sistemis baru mulai diakui melalui sorotan terhadap lemahnya penegakan hukum (38%). Ini memperlihatkan pentingnya memperluas perspektif orang muda agar mampu melihat isu gender tidak hanya sebagai kesadaran personal, tetapi juga sebagai persoalan sistem yang menuntut reformasi hukum, kebijakan, dan kelembagaan.

Orang muda merasa yang menjadikan minimnya kesadaran masyarakat sebagai alasan utama signifikan tidak tertarik (46%), tertarik (49%), dan sangat tertarik (59%) pada isu. Mereka juga tergolong progresif (54%) dan sangat progresif (60%), serta memahami isu gender secara mendalam (82%)

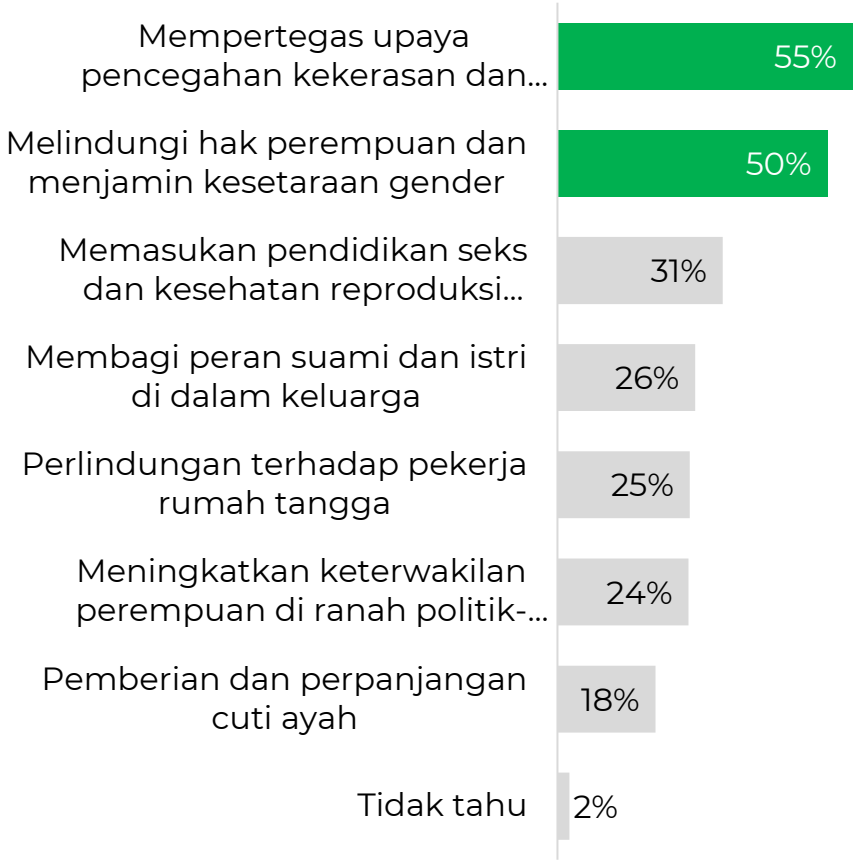
Orang muda pada wilayah Kalimantan (53%), karyawan swasta/PNS (39%), ibu rumah tangga (46%), cukup progresif (39%), progresif (40%), dan sangat progresif (41%), juga sangat tertarik (44%) dengan isu secara signifikan merasa ada lemahnya penegakan hukum.

$G08_mr Menurut kamu, mengapa isu-isu gender tersebut masih menjadi tantangan di Indonesia?

Orang muda paling menginginkan kebijakan yang dapat mencegah kekerasan seksual (55%) dan menjamin kesetaraan gender (50%).

Kebijakan gender yang perlu segera dilaksanakan pemerintah

base: semua, n=1.342



Meskipun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan sejak 2022, kekerasan dan pelecehan seksual masih konsisten menjadi isu gender yang paling diketahui dan dianggap sebagai tantangan utama, termasuk sejak semester sebelumnya. Ini membuat orang muda merasa kebijakan yang dapat mencegah kekerasan dan pelecehan seksual (55%) sangat diperlukan saat ini. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa implementasi UU TPKS di lapangan masih jauh dari optimal, sehingga kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan terus dirasakan oleh orang muda.

Nice to know

Dalam **Prolegnas 2025**, terdapat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang menjamin kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

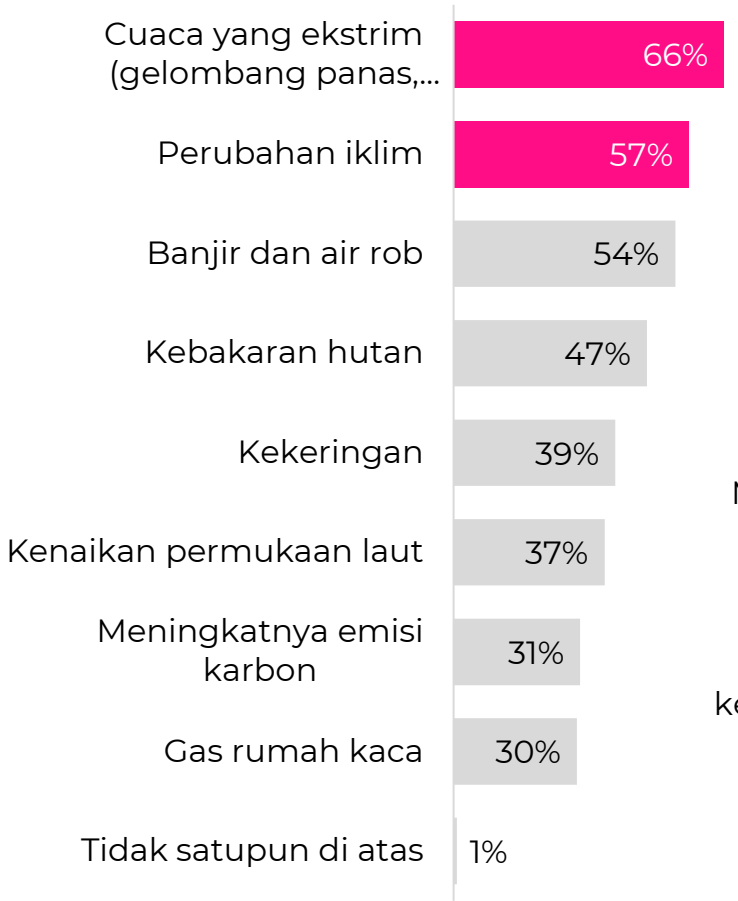
RUU PPRT dibentuk akibat tidak layaknya kondisi kerja PRT, bersamaan dengan ketiadaan payung hukum bagi para pekerja domestik. Namun, meski telah diusulkan sejak 2004, pembahasan dan pengesahan RUU PPRT mandek di DPR hingga saat ini.

$G09_mr Menurut kamu, apa kebijakan terkait gender yang perlu segera dilaksanakan pemerintah?

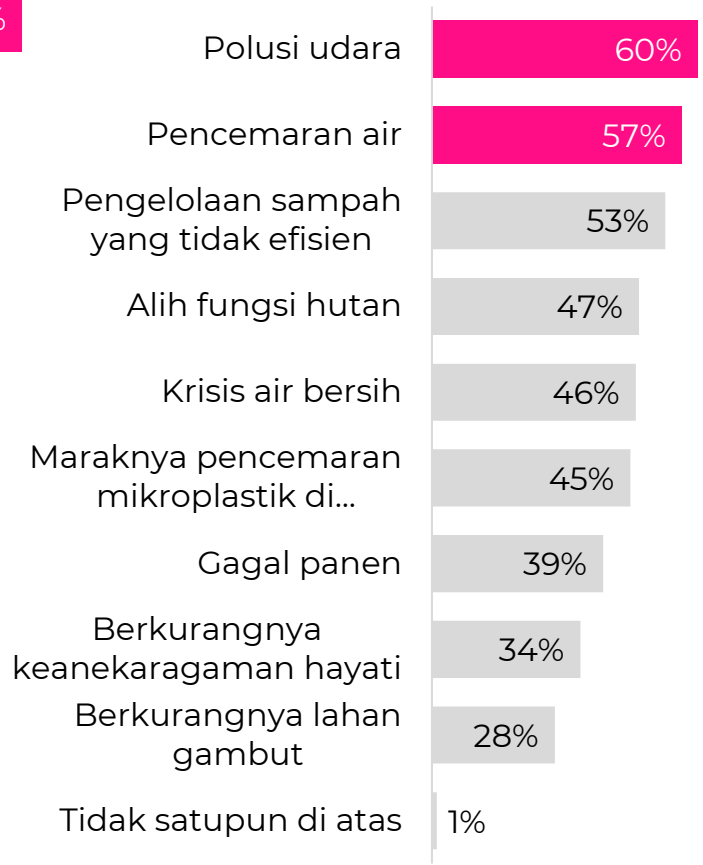
Isu Lingkungan

Ketertarikan orang muda dengan isu, pandangan politik yang progresif, dan tingkat aktivisme yang tinggi linear dengan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai berbagai kategori isu lingkungan.

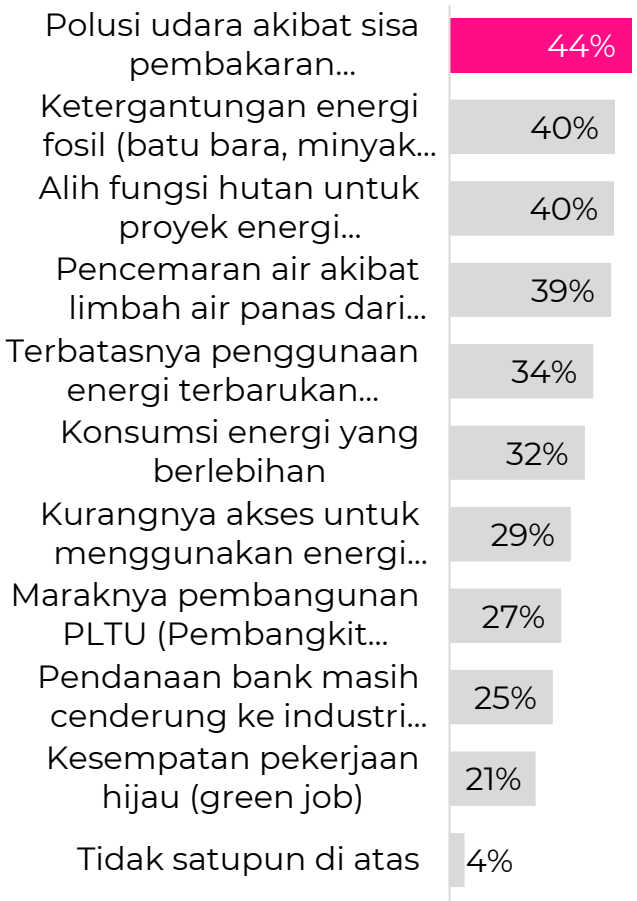
Isu perubahan iklim yang diketahui
base: semua, n=1.342



Isu kerusakan lingkungan dan SDA yang diketahui
base: semua, n=1.342



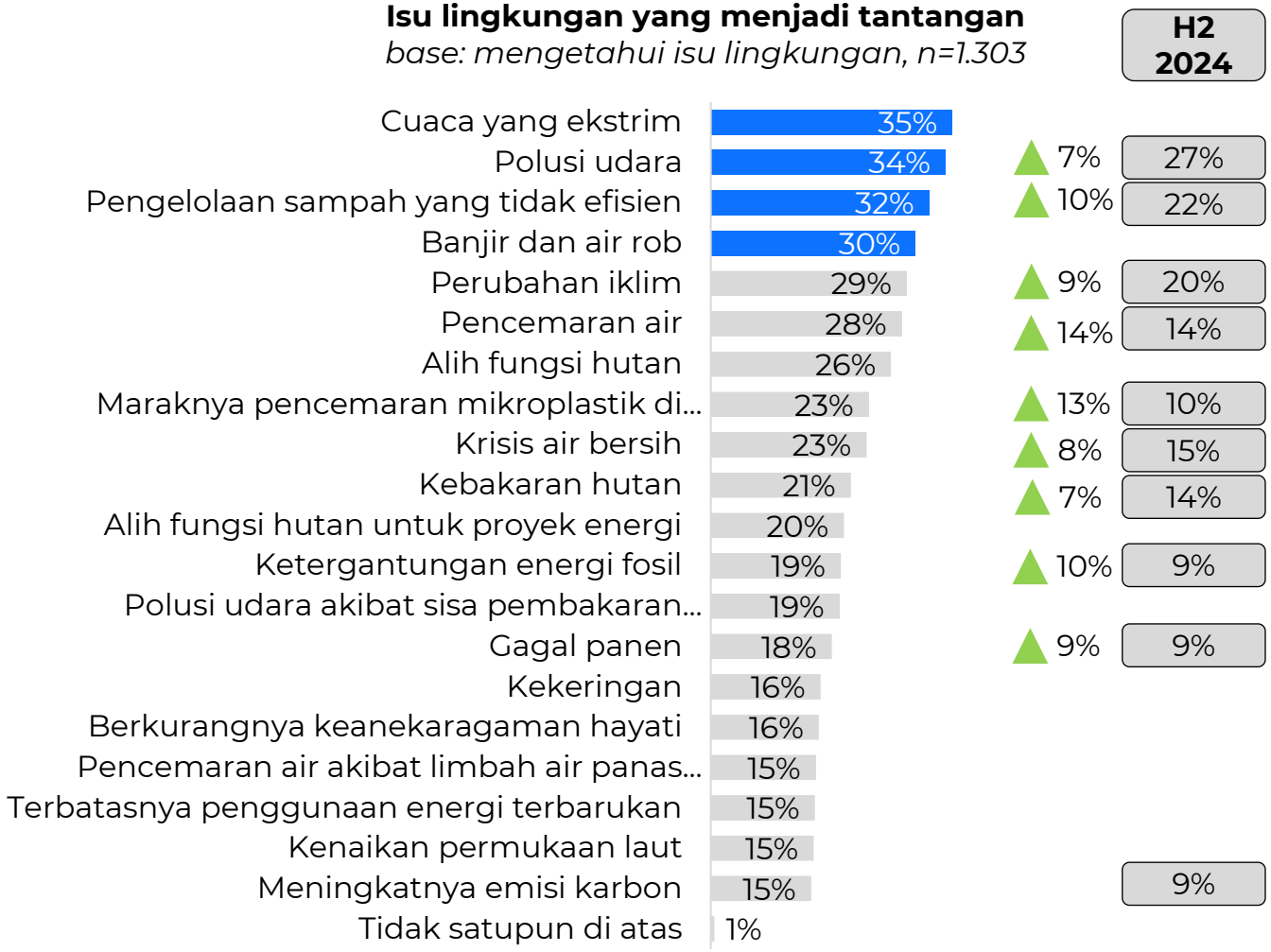
Isu terkait transisi energi yang diketahui
base: semua, n=1.342



$L06a_mr Manakah dari isu terkait perubahan iklim berikut yang kamu ketahui, meskipun kamu hanya pernah mendengarnya?
$L06b_mr Manakah dari isu kerusakan lingkungan dan sumber daya alam berikut yang kamu ketahui, meskipun kamu hanya pernah mendengarnya?
$L06c_mr Manakah dari isu terkait transisi energi berikut yang kamu ketahui, meskipun kamu hanya pernah mendengarnya?

Dibandingkan semester lalu, perhatian orang muda mengenai isu lingkungan yang dianggap sebagai tantangan nasional umumnya meningkat secara signifikan.

Isu lingkungan yang menjadi tantangan
base: mengetahui isu lingkungan, n=1.303



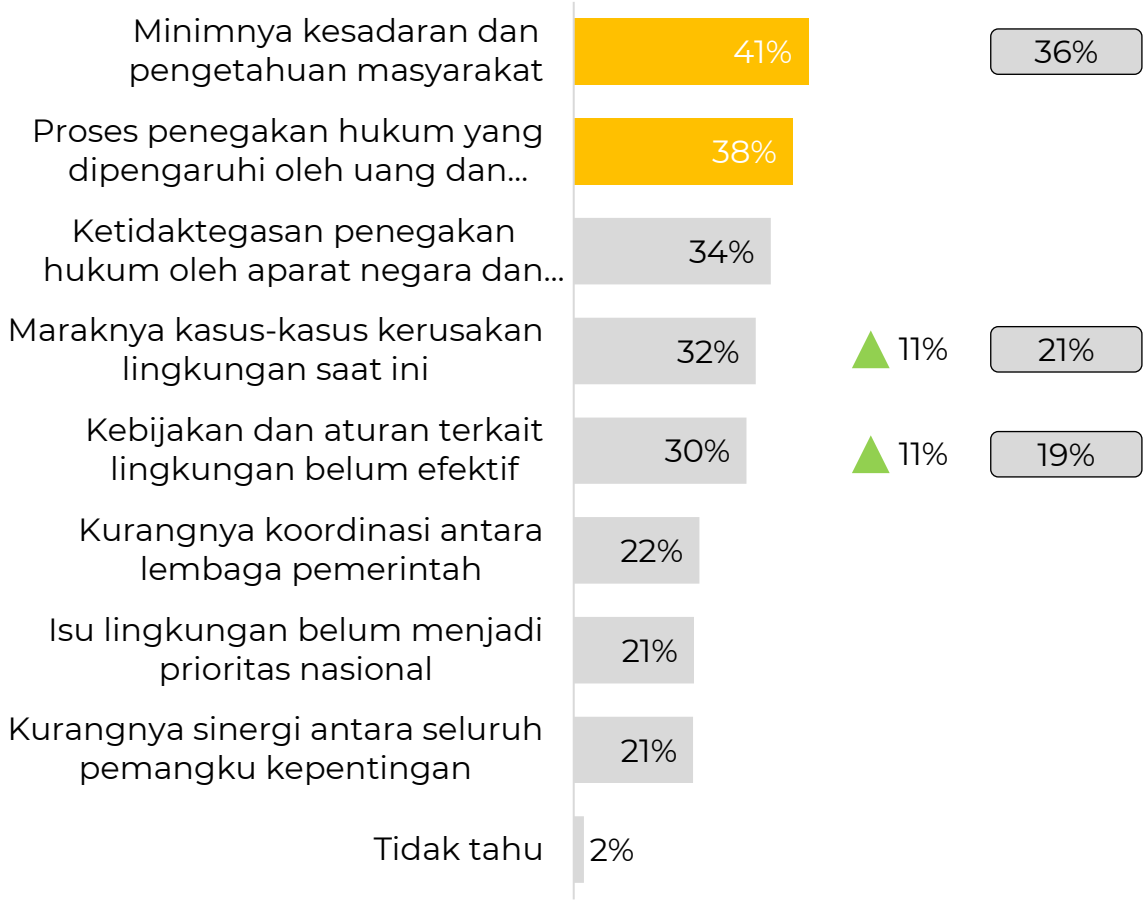
Perempuan (40%), mereka yang tinggal di perkotaan (38%), mereka yang sangat tertarik pada isu lingkungan (45%), berpandangan progresif (40%) dan sangat progresif (46%), serta yang merasa marah (37%) dan sangat marah (43%) merasa cuaca ekstrim menjadi tantangan utama

Polusi udara signifikan lebih diketahui oleh perempuan (40%), ibu rumah tangga (41%), serta bagi mereka yang tertarik (34%) dan sangat tertarik (48%), yang memiliki pendangan progresif (40%) dan sangat progresif (52%), serta merasa sangat marah (46%) pada isu lingkungan.

$L07_mr Menurut kamu, isu lingkungan manakah yang saat ini menjadi tantangan di seluruh Indonesia (skala nasional)?

Orang muda tidak lagi hanya melihat isu lingkungan sebagai persoalan individu, tetapi semakin menyadari akar struktural yang membuat kerusakan lingkungan terus berulang di Indonesia.

Alasan isu lingkungan menjadi tantangan
base: semua, n=1.342



Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat (41%) menjadi alasan utama mengapa isu lingkungan masih menjadi tantangan nasional. Namun, penegakan hukum yang dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan (38%) menempati posisi kedua. Meski alasan tersebut baru masuk dalam semester ini, tetapi langsung mendapat sorotan besar dari orang muda.

Lebih lanjut, alasan terkait maraknya kasus kerusakan lingkungan (32%) dan kebijakan lingkungan yang belum efektif (30%) meningkat secara signifikan (+11%) dibandingkan semester lalu.

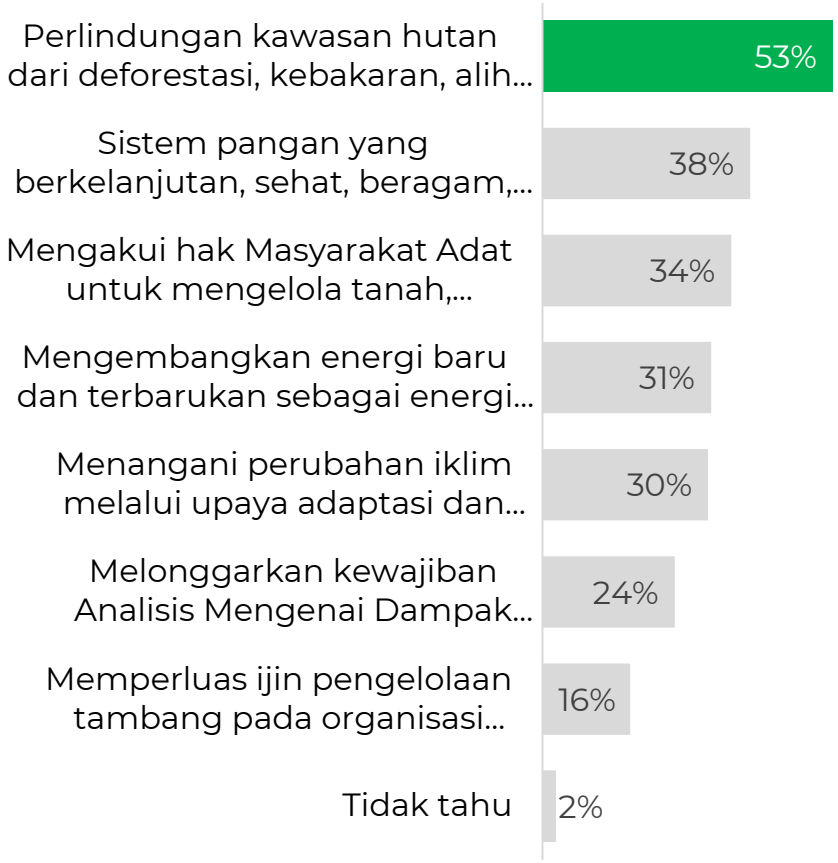
Peningkatan perhatian orang muda terhadap lemahnya praktik kelembagaan dan implementasi kebijakan menunjukkan adanya pergeseran kesadaran. Orang muda kini tidak hanya melihat isu lingkungan sebagai persoalan individu, tetapi semakin memahami alasan yang lebih sistemik yang melanggengkan permasalahan lingkungan di Indonesia.

$L08_mr Menurut kamu, mengapa isu-isu lingkungan tersebut menjadi tantangan di Indonesia?

RUU Kehutanan menjadi relevan dengan aspirasi orang muda, terutama karena 53% menginginkan pemerintah untuk segera mengimplementasikan kebijakan yang melindungi kawasan hutan.

Kebijakan lingkungan yang perlu segera dilaksanakan pemerintah

base: semua, n=1.342



Nice to know

Dalam **Prolegnas 2025**, terdapat beberapa RUU yang dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan:

1. RUU Kehutanan. RUU Kehutanan akan mengubah definisi hutan, kawasan hutan, dan hutan adat, sehingga proses perlindungan atas vegetasi lebih menyeluruh. Secara bersamaan, perubahan ini juga merumuskan pemanfaatan hutan secara ekonomi dan sosial yang sesuai dengan aspek kelestarian lingkungan.

2. RUU Pangan. RUU Pangan mengatur proses pangan di Indonesia dari produksi hingga konsumsi. Pengaturan ini menjamin pemenuhan kebutuhan pangan serta kesejahteraan para petani. Proses produksi pertanian juga didorong untuk lebih fokus pada aspek ekologis.

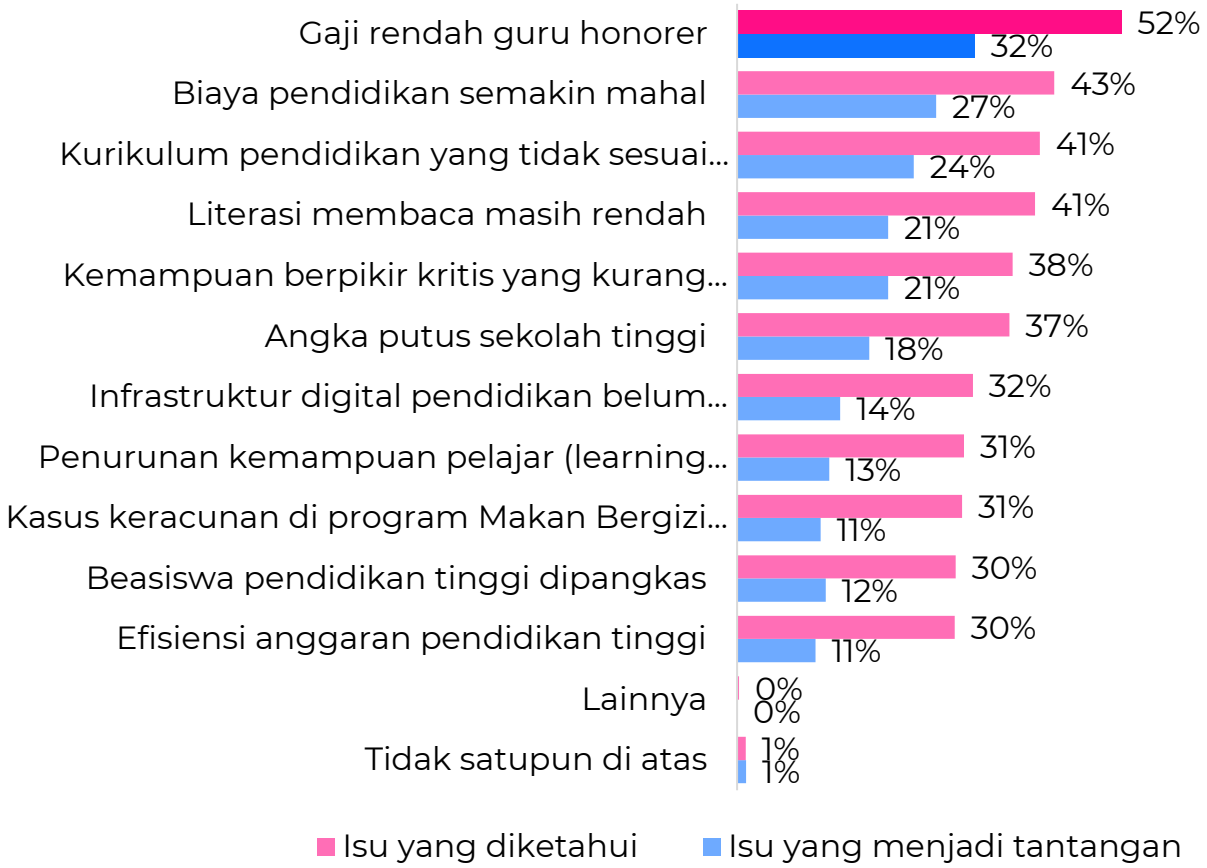
3. RUU Masyarakat Adat. RUU ini akan melindungi dan mengakui secara utuh hak-hak Masyarakat Adat, termasuk wilayah, hukum, identitas budaya, dan pengetahuan mereka, serta menjamin ruang partisipasi yang bermakna bagi Masyarakat Adat.

$L09_mr Menurut kamu, apa kebijakan terkait lingkungan yang perlu segera dilaksanakan pemerintah?

Isu Pendidikan

Gaji guru honorer yang rendah adalah isu yang paling diketahui (52%) dan disorot sebagai tantangan nasional (32%) oleh orang muda saat ini.

Tingkat pengetahuan tentang isu pendidikan
*base: **Diketahui**: semua, n=1.342*
***Dianggap menjadi tantangan**: mengetahui isu pendidikan, n=1.303*



Umumnya, orang muda merasa khawatir dan menunjukkan perhatiannya terhadap isu gaji guru (honorer) yang rendah. Isu ini belakangan makin disorot setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengeluarkan pernyataan bahwa gaji guru (dan dosen) bukan sepenuhnya menjadi tanggungan negara dan justru menjadi tantangan bagi keuangan negara.

Mereka yang tertarik (55%) dan sangat tertarik (64%) terhadap itu pendidikan, signfikan lebih mengetahui isu soal rendahnya gaji guru honorer. Begitu juga dengan mereka yang progresif (65%) dan sangat progresif (71%), mereka lebih signifikan dalam mengetahui isu terkait rendahnya gaji guru honorer.

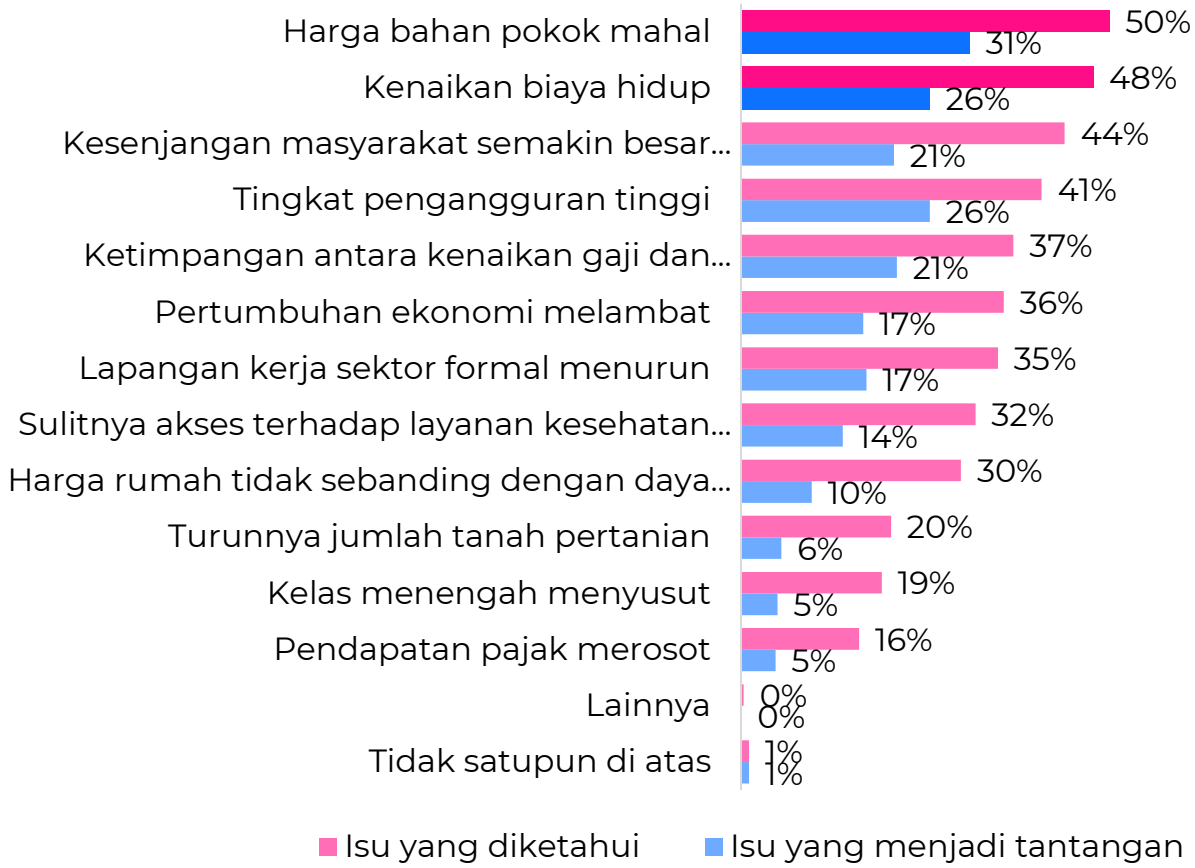
Sedangkan, mereka yang cukup konservatif (30%) signifikan lebih rendah dalam menilai gaji guru honorer sebagai tantangan nasional, sama halnya bagi orang muda yang tinggal di Sumatera (44%), dibandingkan wilayah lainnya.

$P01_mr Manakah dari isu pendidikan berikut yang kamu ketahui, meskipun kamu hanya pernah mendengarnya?
$P02_mr Menurut kamu, isu pendidikan manakah yang saat ini menjadi tantangan di seluruh Indonesia (skala nasional)?

Isu Ekonomi

Kenaikan harga bahan pokok paling diketahui (50%) dan dianggap tantangan (31%) oleh orang muda, terutama bagi perempuan dan ibu rumah tangga.

Tingkat pengetahuan tentang isu ekonomi
*base: **Diketahui**: semua, n=1.342*
***Dianggap menjadi tantangan**: mengetahui isu ekonomi, n=1.303*



Isu harga bahan pokok dan biaya hidup yang semakin mahal signifikan lebih tinggi diketahui oleh perempuan (55%; 53%) dan ibu rumah tangga (59%; 58%). Kenaikan biaya hidup signifikan dianggap menjadi tantangan nasional oleh (40%). Hal ini memperlihatkan bagaimana isu ekonomi, khususnya terkait harga kebutuhan pokok dan kenaikan biaya hidup, berdampak langsung pada kelompok yang lebih dekat dengan urusan rumah tangga dan pengelolaan konsumsi harian. Temuan ini juga menunjukkan keterhubungan antara isu ekonomi dan gender, dimana beban ekonomi (khususnya rumah tangga) lebih banyak dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki.

Perempuan (55%), ibu rumah tangga (59%), dan orang muda perkotaan (52%), mereka yang sangat tertarik (58%), progresif (58%), dan sangat progresif (68%) merasa sangat marah (56%) dan secara signifikan mengetahui isu

Perempuan (53%), ibu rumah tangga (58%), dan orang muda perkotaan (51%), merasa tertarik (52%) dan sangat tertartik (55%), serta mereka yang progresif (60%) dan sangat progresif (59%) secara signifikan mengetahui isu

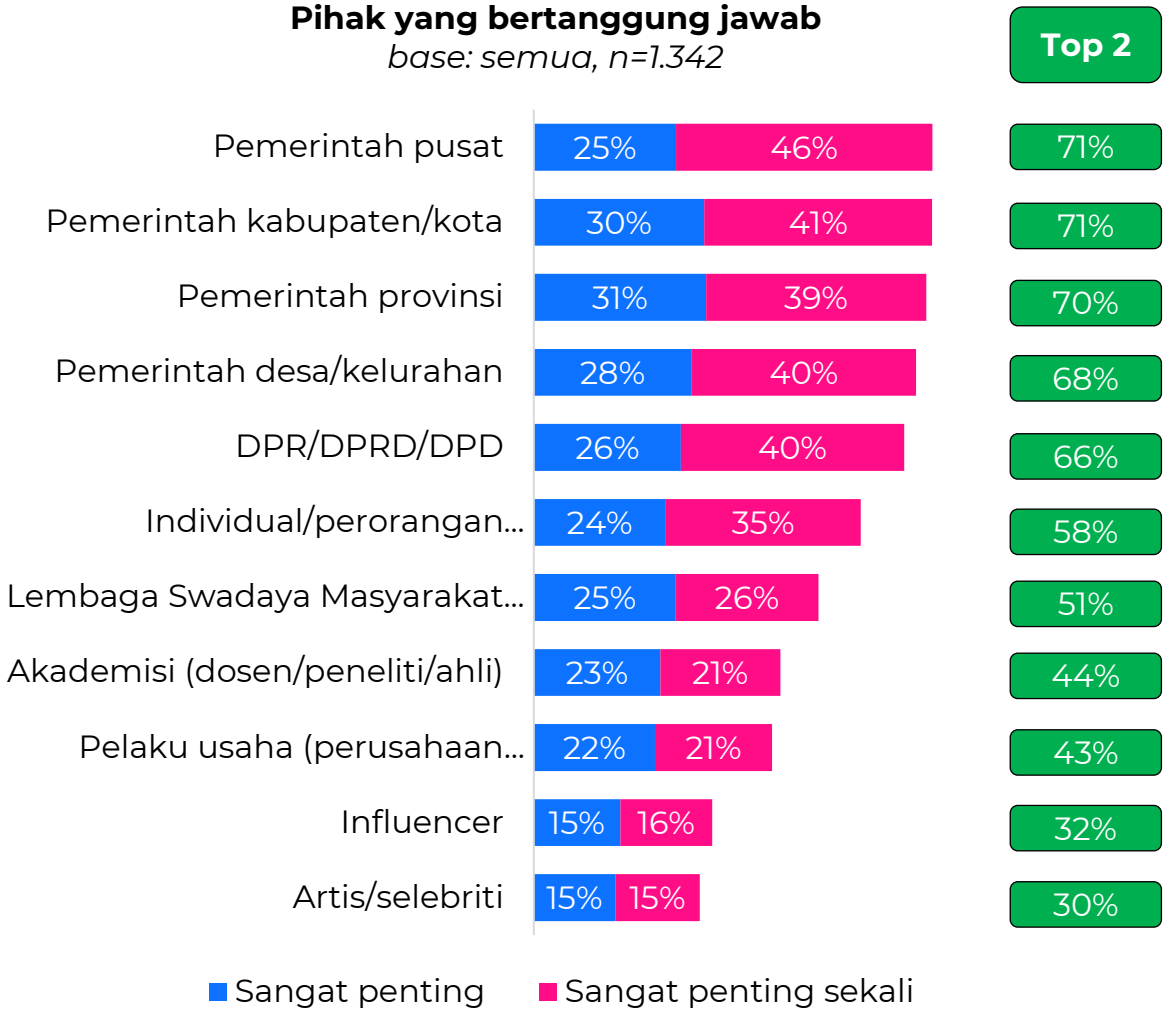
$E01_mr Manakah dari isu ekonomi berikut yang kamu ketahui, meskipun kamu hanya pernah mendengarnya?
$E02_mr Menurut kamu, isu ekonomi manakah yang saat ini menjadi tantangan di seluruh Indonesia (skala nasional)?

Pelopor Pilihan17

Penilaian Orang Muda Terhadap Peran Pemerintah

Orang muda menganggap pemerintah pusat (71%) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pihak yang bertanggung jawab
base: semua, n=1.342



Pemerintah pusat dianggap bertanggung jawab, terutama bagi usia 21-25 (76%), mereka di perkotaan (75%), *activist* (52%), dan *frontliner* (65%), merasa tertarik (71%) dan sangat tertarik (90%), progresif (78%), sangat progresif (87%), serta bagi mereka yang marah (70%) dan sangat marah (88%)

Pemerintah provinsi dianggap bertanggung jawab, terutama bagi mereka yang merupakan *activist* 76% dan *frontliner* 84%, mereka yang sangat tertarik (90%), progresif (77%), sangat progresif (83%), sangat tidak marah (70%), marah (67%), sangat marah (90%)

Pemerintah kabupaten/kota dianggap bertanggung jawab, terutama bagi penduduk di wilayah Jawa (45%), di perkotaan (73%), umur 21-25 (77%), *activist* (65%), *frontliner* (85%), juga bagi mereka yang sangat tertarik (89%), progresif (77%), sangat progresif (82%), dan sangat marah (87%)

Q02 Menurut kamu, siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan di orang muda?

Meski memiliki peran yang sangat krusial, orang muda menilai kinerja pemerintah masih (jauh) di bawah ekspektasi, terutama terkait antikorupsi (NET score: -77%). Penurunan NET Score paling signifikan terlihat di lingkungan (-41%) dan gender (-40%).

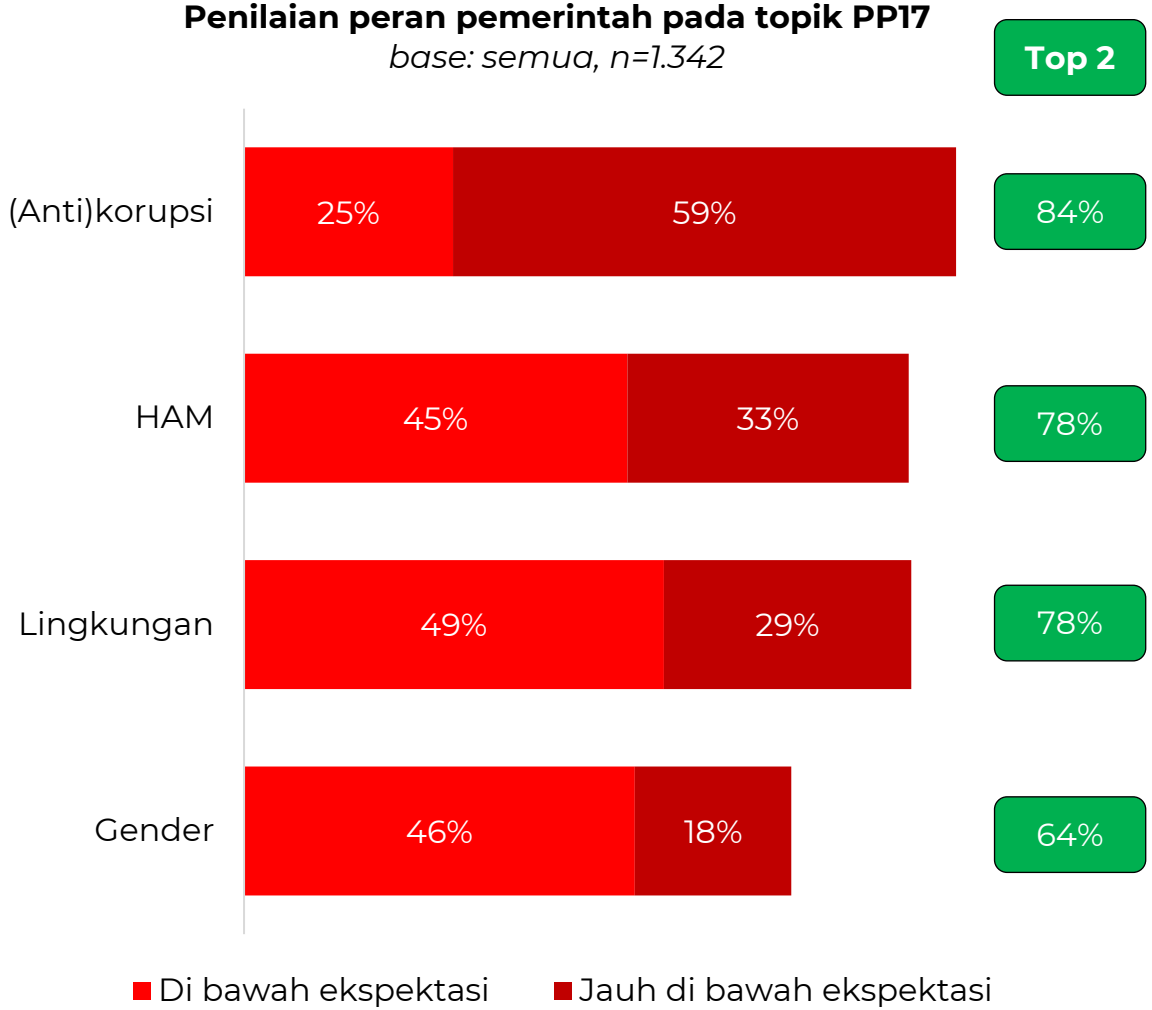
Penilaian peran pemerintah pada topik PP17
base: semua, n=1.342

	(Jauh) di bawah ekspektasi	(Jauh) di atas ekspektasi	NET score*		**H2 2024**
Antikorupsi	84%	7%	-77%	▼ -21%	-56%
HAM	78%	4%	-74%	▼ -34%	-40%
Lingkungan	78%	4%	-74%	▼ -41%	-33%
Gender	66%	4%	-62%	▼ -40%	-22%

PM01 Bagaimana penilaian kamu terhadap peran pemerintah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan topik-topik berikut?
PM01_01 Lingkungan
PM01_02 HAM
PM01_03 Gender
PM01_04 Antikorupsi

Peran pemerintah di empat pilar PP17 masih dinilai (jauh) di bawah ekspektasi.

Penilaian peran pemerintah pada topik PP17
base: semua, n=1.342



Isu (anti)korupsi menjadi isu yang paling dianggap (jauh) di bawah ekspektasi (84%), terutama bagi perempuan (86%), mereka yang cukup progresif (82%), progresf (88%), sangat progresif (92%), agak marah (87%), marah (87%), serta sangat marah (88%).

Isu HAM dinilai (jauh) di bawah ekspektasi (78%), terutama bagi kategori umur 31+ (54%), orang muda wilayah Jawa (48%) dan Sulawesi (50%), mereka yang progresif (82%), sangat progresif (89%), serta mereka yang agak marah (78%), marah (82%), sangat marah (84%)

Isu lingkungan dinilai (jauh) di bawah ekspektasi (78%), terutama bagi orang muda dengan kategori umur 31+ (83%), mereka yang tinggal di Nusa Tenggara (85%) dan Sulawesi (86%), mereka yang tidak tertarik (82%) dengan isu ini, merasa agak marah (80%), marah (82%), dan sangat marah (82%)

Isu gender dinilai (jauh) di bawah ekspektasi (64%), terutama bagi perempuan (67%), mereka yang sangat tidak tertarik (96%), agak marah (67%), marah (65%), serta bagi mereka yang sangat marah (72%)

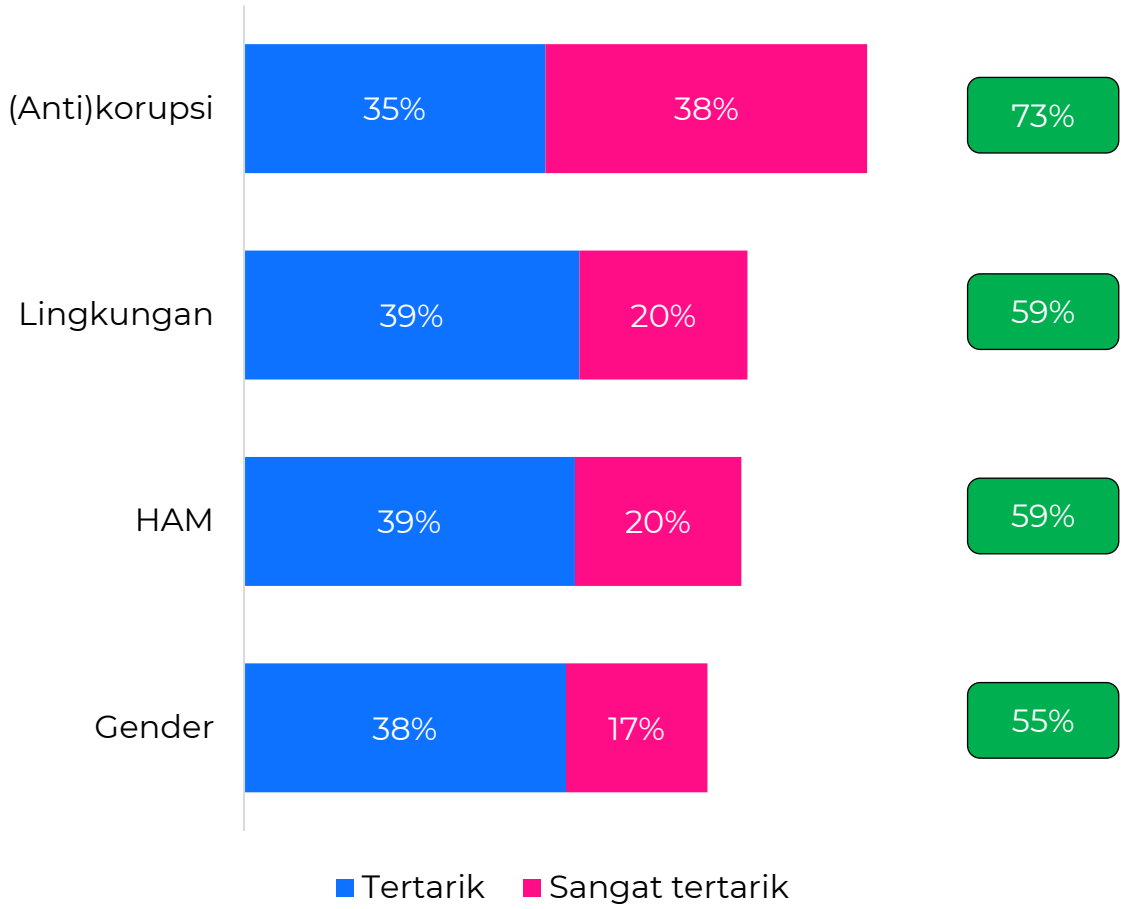
PM01 Bagaimana penilaian kamu terhadap peran pemerintah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan topik-topik berikut?
PM01_01 Lingkungan
PM01_02 HAM
PM01_03 Gender
PM01_04 Antikorupsi

Pelopor Pilihan17

Aspirasi Keterlibatan Orang Muda

Antikorupsi (73%) paling diminati orang muda untuk ikut terlibat dalam 12 bulan ke depan.

Minat orang muda terhadap isu
base: semua , n=1.342



Isu antikorupsi menjadi isu yang diminati, terutama bagi mereka di Jawa (76%), Sulawesi (78%), perkotaan (75%), mereka yang *activist* (84%) dan *frontliner* (90%), sangat progresif (83%) dan progresif (80%), tertarik (90%) dan sangat tertarik (99%), merasa (sangat) tidak marah (75%) terhadap isu, serta (sangat) marah (83%) terhadap isu.

Isu lingkungan menjadi isu yang diminati orang muda, terutama bagi orang perkotaan (63%), memiliki pendidikan tinggi (67%), baru lulus/sedang mencari kerja (69%), *activist* (72%), dan *frontliner* (79%), serta mereka yang memiliki pandangan sangat progresif (75%) dan progresif (67%).

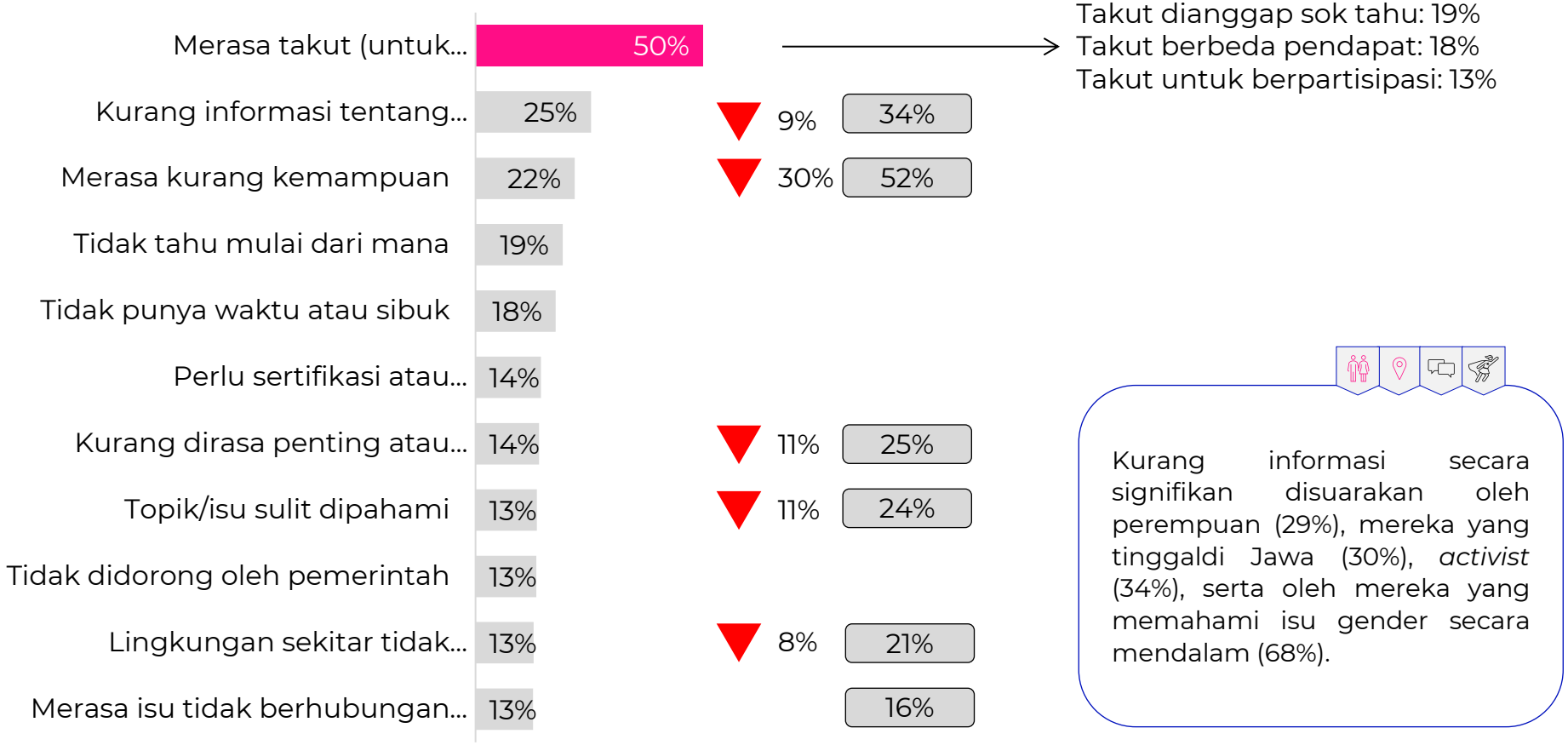
Isu HAM menjadi isu yang diminati orang muda, terutama bagi mereka yang baru lulus/sedang mencari pekerjaan (68%), *activist* (73), *frontliner* (80%), memiliki pandangan sangat progresif (73%) dan progresif (63%), merasa tertarik (72%) dan sangat tertarik (98%).

Isu gender menjadi isu yang diminati orang muda terutama bagi perempuan (58%), pelajar (62%), mereka yang *activist* (68%), *frontliner* (68%), mereka yang memiliki pandangan sangat progresif (67%), sangat tertarik (91%), merasa sangat tidak marah (65%).

AK01 Seberapa besar minat kamu untuk terlibat dalam upaya mengangkat isu lingkungan, HAM, gender, atau (anti)korupsi dalam 12 bulan ke depan?

Rasa takut (50%) menjadi hambatan terbesar bagi orang muda untuk (mulai) ikut berpartisipasi dalam aktivitas terkait antikorupsi, HAM, gender, dan lingkungan.

Alasan belum ingin berpartisipasi dalam kegiatan antikorupsi/HAM/gender/lingkungan
base: (sangat) tidak tertarik, n=824

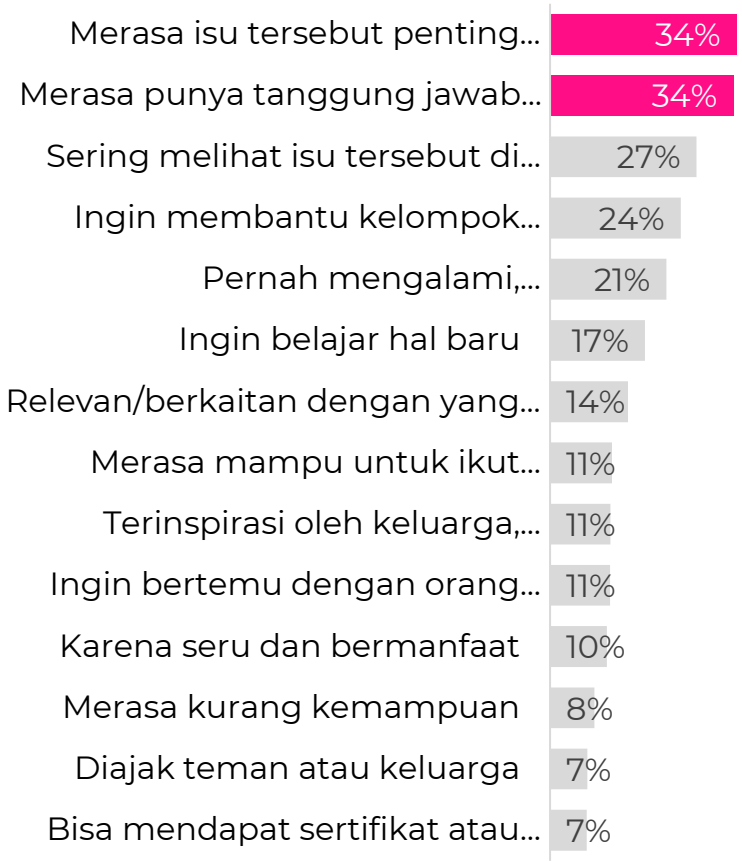


Kurang informasi secara signifikan disuarakan oleh perempuan (29%), mereka yang tinggaldi Jawa (30%), *activist* (34%), serta oleh mereka yang memahami isu gender secara mendalam (68%).

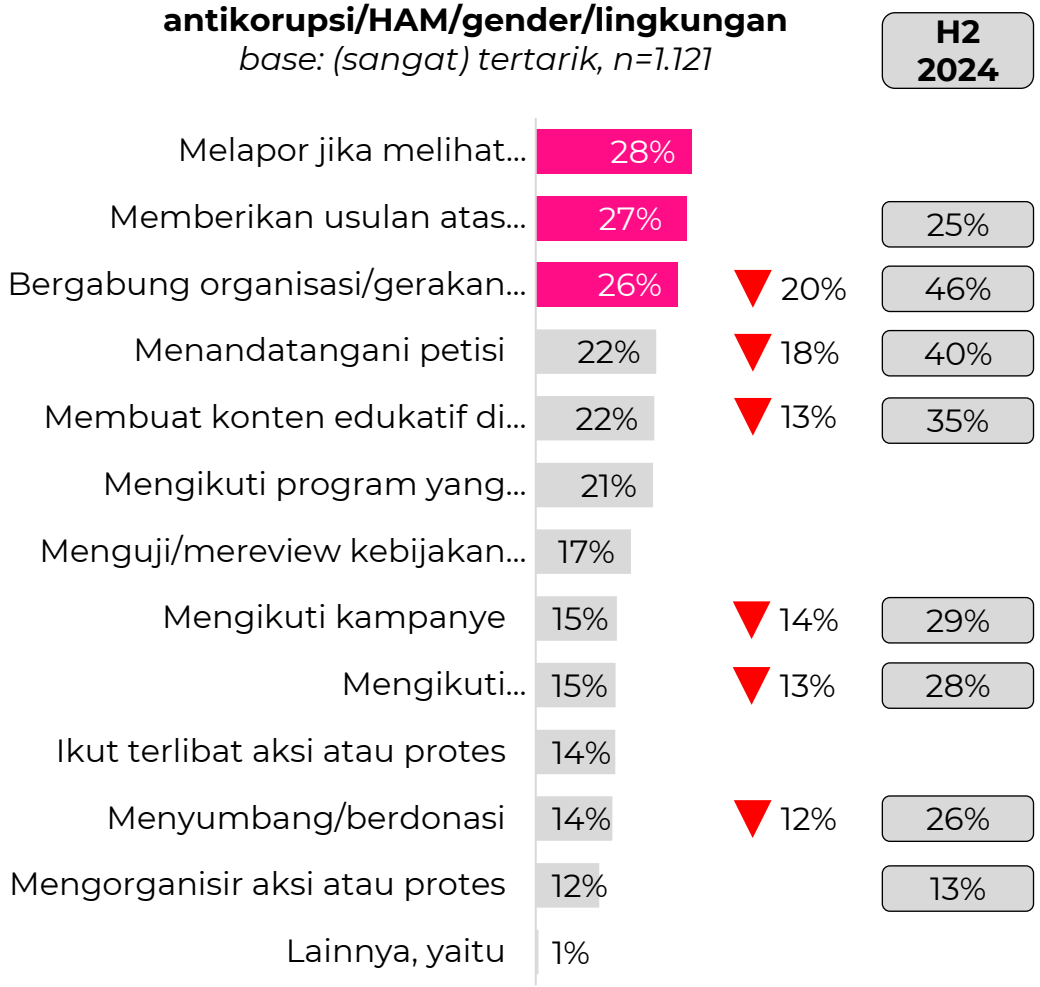
$ak02a_mr Apa yang membuat kamu tidak/belum ingin berpartisipasi dalam kegiatan untuk mengatasi masalah lingkungan/HAM/gender/korupsi?

Dorongan utama orang muda untuk berpartisipasi berasal dari kesadaran bahwa isu tersebut penting dan berdampak (34%) serta rasa tanggung jawab (34%). Orang muda ingin mengikuti bentuk kegiatan yang langsung menyentuh kebijakan.

Alasan ingin berpartisipasi dalam kegiatan antikorupsi/HAM/gender/lingkungan
base: (sangat) tertarik, n=1.121



Kegiatan menarik untuk terlibat dalam isu antikorupsi/HAM/gender/lingkungan
base: (sangat) tertarik, n=1.121



$ak02b_mr Apa yang membuat kamu ingin berpartisipasi dalam kegiatan untuk mengatasi masalah lingkungan/HAM/gender/korupsi?
$ak03b_mr Di antara kegiatan berikut, mana yang membuat kamu tertarik untuk berkontribusi dalam mengatasi isu lingkungan/HAM/gender/korupsi?

Pelopor
Pilihan17

Metodologi

Desain Penelitian Kuantitatif

Tujuan penelitian

Studi ini bertujuan untuk memahami:

- ✓ Tingkat aktivisme dan spektrum politik orang muda.
- ✓ Tingkat kesadaran orang muda terkait isu korupsi, HAM, gender, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi.
- ✓ Posisi orang muda terkait isu korupsi, HAM, gender, dan lingkungan terkini.
- ✓ Emosi yang dirasakan orang muda terkait isu-isu terkini.
- ✓ Persepsi orang muda terhadap kinerja dan peran pemerintah.
- ✓ Kesediaan orang muda untuk bertindak dan terlibat dalam aktivisme sosial dan politik.
- ✓ Alasan orang muda untuk terlibat maupun tidak terlibat dalam aktivisme sosial dan politik.

Metodologi

Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei *online*

Periode pengumpulan data

10 – 17 Juli 2025

Sampel

n = 1.342 responden*
Age: 17 – 35 tahun
Area: Indonesia

**representatif untuk Indonesia*

Profil Responden*

base: semua, n=1.342

Jenis kelamin	
Perempuan	49%
Laki-laki	51%

Usia	
≤ 20 tahun	9%
21 – 25 tahun	27%
26 – 30 tahun	38%
≥ 31 tahun	26%

SES	
SES A	45%
SES B	41%
SES C	14%

Wilayah	
Sumatera	19%
Jawa	60%
Nusa Tenggara	6%
Kalimantan	6%
Sulawesi	8%
Lainnya	2%

Pendidikan	
Dasar & menengah	86%
Perguruan tinggi	14%

Pekerjaan	
Pelajar	11%
Fresh graduate	9%
Karyawan swasta & ASN	37%
Ibu rumah tangga	16%
Lainnya	26%

** Hasil sudah dibobot (weighted) berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan pendidikan*